

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMKM PADA MASYARAKAT
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURKHAFIFAH ANUGRAH

NIM : 2220203862201016

PAREPARE

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMKM PADA MASYARAKAT
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURKHAFIFAH ANUGRAH

NIM : 2220203862201016

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam
Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurkhafifah Anugrah

NIM : 2220203862201016

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-4735/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M. Th.I

NIP : 197006272005011005



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP 19781101 200912 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam
Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurkhafifah Anugrah

NIM : 2220203862201016

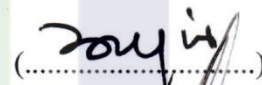
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-4735/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2025

Tanggal Ujian : 22 Juni 2026

Disahkan Oleh:

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M. Th.I. (Ketua) 

Dr. Besse Faradiba, S.E., M.M. (Anggota) 

Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




/ Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP 19781101 200912 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT , atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orangtua tercinta. Cinta pertama penulis Ayahanda Sibali dan Ibunda tercinta Hafsah. S serta saudara-saudariku Nur Aliyah Melani, Nur Aqilah Ramlah, dan Muhammad Nur Khalik Azhim, dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc,M. Th.I selaku pembimbing yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah berusaha keras menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang jauh lebih baik dan maju, serta selaku Dosen penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M. FiI.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

4. Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M. Th.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Besse Faradiba, M.M. dan Ibu Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
8. Area Manager/Branch Manager dan Seluruh Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang yang telah memberikan izin, bantuan, serta bimbingan kepada penulis selama proses pengumpulan data dan penelitian.
9. Kepada sosok istimewa dalam hidup penulis, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, kesabaran, untaian doa, serta motivasi yang tiada henti menguatkan penulis di kala lelah melanda dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta yaitu Risdawati, Adinda Nirwana, Fitri Buhari, Sri Indah Wahyuni, Niarfah, Sarmila, Citra, yang selalu menemani perjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih atas solidaritas, tawa, tangis, serta dukungan satu sama lain yang membuat perjalanan meraih gelar S.Tr.Ak ini terasa jauh lebih indah dan bermakna.
11. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Porma Angkatan X yang senantiasa memberikan dukungan, inspirasi, serta pengalaman berharga yang turut membentuk kemampuan dan semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi.
12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat dan teman-teman KKN Desa Buntubuangin yang telah memberikan semangat, bantuan, serta kenangan berharga selama menjalani kegiatan KKN. Kebersamaan dan

dukungan yang diberikan menjadi salah satu motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Last but not least, Anak Perempuan kedua yang juga merupakan harapan keluarganya, Nurkafifah Anugrah. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri-sendiri meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Namun, Terima kasih telah bekerja keras dan berjalan sejauh ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak telah memberikan bantuan dan mendorong semangat, baik secara moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jahiyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 21 Mei 2026

Penulis,



Nurkafifah Anugrah

NIM: 2220203862201016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkhafifah Anugrah
NIM : 2220203862201016
Tempat/ Tgl. Lahir : Ammani, 02 Juli 2004
Program studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisi Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam
Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di Kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2026

Penulis,



Nurkhafifah Anugrah
NIM.2220203862201016

ABSTRAK

Nurkhafifah Anugrah, *Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh H. Mukhtar Yunus)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan secara komprehensif melalui wawancara semi-terstruktur bersama pihak *Micro Business Relationship* (MBR) BSI Kantor Cabang Pinrang serta pelaku UMKM lokal, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang. Seluruh data dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menjalankan peran pemberdayaan ekonomi melalui empat dimensi utama: fasilitator permodalan via KUR Syariah, pendampingan kapasitas SDM, akselerator digital melalui BYOND dan QRIS, serta dilakukan optimalisasi peran sosial berbasis Ziswaf. Keberhasilan program didorong oleh sinergi sosiokultural religiusitas masyarakat setempat dan dukungan regulasi subsidi margin dari pemerintah. Kendati demikian, efektivitas pemberdayaan masih menemui hambatan struktural berupa jarak geografis yang jauh serta jaringan internet tidak stabil (*blank spot*). Selain itu, terdapat hambatan kultural berupa rendahnya literasi keuangan syariah nasabah, hingga keterbatasan personel lapangan dalam melakukan monitoring usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Pemberdayaan Ekonomi, UMKM, Batulappa, daerah pelosok.*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan teori.....	12
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Tehnik Pengumpulan Data	31

F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	115
BIODATA PENULIS	138

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Data Pelaku UMKM Kecamatan Batulappa	3



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	116
3	Surat Keterangan Wawancara	128
4	Surat Keterangan Izin Penelitian	133
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	135
6	Dokumentasi Wawancara	136

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau’*
 شَيْءٌ : *syai’un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ذِينَ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS Al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/.., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. Editor (atau, eds. [kata dari *editors*] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perekonomian UMKM pada lima tahun terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan melalui penguatan ekosistem *halal value chain* dan digitalisasi pembiayaan yang inklusif. Hingga awal tahun 2026, BSI berhasil mencatatkan penyaluran KUR Syariah yang melampaui Rp1,65 triliun hanya dalam periode dua bulan pertama, di mana sekitar 65% dialokasikan secara strategis pada sektor produksi seperti pertanian dan pengolahan pangan halal untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.¹ Transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek permodalan semata, tetapi juga mencakup pendampingan intensif melalui BSI UMKM Center yang telah membina lebih dari 5.600 pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dan akses pasar internasional, sehingga menciptakan model pemberdayaan yang resilien di tengah fluktuasi ekonomi global.² Dengan integrasi teknologi dan prinsip syariah, BSI secara efektif mampu meningkatkan kelas UMKM dari skala tradisional menuju entitas bisnis yang kompetitif secara global serta memiliki kepastian hukum dan syariah dalam operasionalnya.³

Pemerintah Republik Indonesia memperkuat peran industri keuangan ini melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan hasil penggabungan tiga bank Syariah BUMN (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah). BSI diharapkan mampu menjadi bank internasional yang inklusif, terbuka, menyeluruh, serta menjangkau seluruh segmen masyarakat untuk menjadi nasabah. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai produk unggulan

¹ Kemas Erwan Husainy, dalam "Tancap Gas awal 2026, BSI Salurkan Rp1,65 Triliun KUR Syariah," *News Update Bank Syariah Indonesia*, 21 April 2026.

² PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Laporan Keberlanjutan 2025: Di Era Baru Bank Emas*, (Jakarta: BSI, 2025), hlm. 195.

³ Ahmad Sholikin, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 4, No. 1 (2025).

seperti BSI KUR Mikro untuk tambahan modal kerja maupun investasi, serta kartu kredit syariah BSI Hasanah Card untuk kemudahan transaksi berbasis syariah. Program ini sangat relevan mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang mencakup 99,99% unit usaha di Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja dunia usaha.⁴

Kecamatan Batulappa merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pinrang yang memiliki karakteristik geografis unik. Keunikan ini terletak pada topografi wilayahnya yang memadukan perbukitan hijau, lembah tersembunyi, serta aliran sungai jernih. Selain menciptakan panorama alam yang memukau, kondisi ini juga berpotensi besar dalam sektor ekowisata karena didominasi oleh perbukitan dan lahan pertanian subur. Secara sosiologis, masyarakat di wilayah ini dikenal memiliki etos kerja tinggi, terutama dalam mengelola sumber daya alam lokal menjadi komoditas bernilai ekonomi.⁵ Potensi utama Kecamatan Batulappa terletak pada sektor industri rumah tangga dan pertanian, di mana pengolahan gula aren dan hasil bumi lainnya menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan.⁶ Secara sosiologis, masyarakat di wilayah ini dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, terutama dalam mengelola sumber daya alam lokal menjadi komoditas bernilai ekonomi.⁷ Keberadaan unit-unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai desa di Batulappa menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki basis ekonomi riil yang kuat.⁸

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Merger Bank Syariah: Strategi Penguatan Industri Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 85-92.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Kecamatan Batulappa Dalam Angka 2024* (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2024), hlm. 5.

⁶ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pinrang, *Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang* (Pinrang: Dinas Koperasi dan UMKM, 2023), hlm. 12.

⁷ Syarifuddin Bakti, "Transformasi Ekonomi Pedesaan: Studi Sosiologi Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Sosio-Ekonomi Rural* 8, no. 2 (2022): hlm. 45.

⁸ Andi Muhammad Akmal, "Potensi Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Gula Aren di Sulawesi Selatan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): hlm. 78.

Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat krusial dalam menopang sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kehadiran Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran berbasis prinsip syariah menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang menginginkan keadilan dan kemaslahatan umat. Strategi operasional bank Islam harus dikaji secara khusus karena tidak hanya berorientasi pada peluang bisnis semata, tetapi juga pada kepatuhan prinsip syariah dalam setiap sirkulasi uang. Keberadaan perbankan syariah di tengah masyarakat pedesaan bukan sekadar entitas komersial, melainkan harus mampu menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang membawa kemaslahatan bagi ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perbankan Islam yang berfokus pada distribusi kekayaan yang adil melalui skema pembiayaan yang produktif.⁹ Potensi besar UMKM ini terlihat nyata di wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di Kecamatan Batulappa. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang tahun 2025, populasi pelaku UMKM di wilayah ini memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pelaku UMKM Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

No.	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
1	Perdagangan	48
2	Industri Pertanian	123
3	Non Pertanian	14
4	Aneka jasa	21
Jumlah		206

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Pinrang 2025

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 12-15.

Tabel 1.1 menyajikan data sebaran pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025 yang menunjukkan total populasi sebanyak 206 unit usaha. Struktur ekonomi di wilayah ini didominasi secara mencolok oleh sektor Industri Pertanian yang mencapai 123 pelaku usaha atau sekitar 60% dari keseluruhan data, mengindikasikan bahwa poros ekonomi masyarakat setempat sangat bergantung pada hilirisasi potensi alam seperti pengolahan hasil tani dan produksi gula aren. Selanjutnya, sektor Perdagangan menempati posisi kedua dengan 48 unit usaha, disusul oleh sektor Aneka Jasa sebanyak 21 unit, dan kategori Non-Pertanian yang hanya berjumlah 14 unit usaha. Meskipun secara kuantitas angka 206 unit ini mencerminkan antusiasme wirausaha yang tinggi, terdapat tantangan fundamental dalam hal pengembangan skala bisnis dan pemenuhan aspek legalitas usaha.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Batulappa umumnya masih berjalan secara otodidak tanpa sentuhan pelatihan manajerial maupun bantuan modal yang memadai. Kesenjangan terjadi ketika mandat pemberdayaan BSI secara nasional belum dirasakan dampaknya secara nyata oleh pelaku usaha di wilayah ini. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mengakses pembiayaan karena kendala administratif seperti agunan atau prosedur birokrasi yang dianggap rumit. Selain itu, minimnya literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih pinjaman instan dari rentenir atau pinjaman online yang menjerat.¹⁰

Fenomena nyata yang ditemukan menunjukkan bahwa meskipun BSI telah hadir sebagai pilar keuangan syariah, rendahnya pemahaman mengenai perbedaan konkret produk syariah dengan konvensional masih menjadi masalah utama. Program pemberdayaan ekonomi seringkali hanya berhenti pada tahap penyaluran modal tanpa diikuti oleh pendampingan usaha yang berkelanjutan, sehingga

¹⁰ Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Ibu Daling dan Bapak Syarif (Pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa), tanggal 10 Februari 2026.

pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Padahal, karakteristik lokal Batulappa yang didominasi sektor industri pertanian memerlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih spesifik agar potensi lokal tersebut tersentuh secara maksimal oleh strategi inklusi keuangan BSI.¹¹

Selain faktor aksesibilitas, efektivitas kebijakan perbankan sangat bergantung pada sinkronisasi antara peraturan administratif dan kondisi riil di lapangan. Seringkali terdapat kesenjangan antara harapan pemerintah dalam pemeratakan ekonomi dengan syarat administratif perbankan, seperti syarat minimal usaha berjalan 2 tahun, yang justru menjadi penghalang bagi pengusaha pemula di daerah seperti Batulappa untuk berkembang. Diperlukan analisis terhadap bagaimana BSI mampu memberikan relaksasi birokrasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank, sehingga modal kerja dapat terserap secara maksimal oleh industri pertanian lokal.¹²

Tantangan literasi keuangan juga menjadi indikator krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perbankan syariah menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap godaan pinjaman instan yang tidak memiliki landasan etika bisnis yang sehat. Hal ini menandakan bahwa peran BSI tidak boleh berhenti pada penyediaan dana semata, melainkan harus aktif dalam memberikan edukasi keuangan syariah secara berkala guna meningkatkan kecerdasan finansial para pelaku UMKM agar mereka mampu mengelola modal secara efektif.¹³

Lebih jauh lagi, tingginya tingkat kompetisi pasar akibat banyaknya jumlah pelaku usaha yang sejenis di wilayah Batulappa menuntut adanya strategi pemasaran dan inovasi produk yang lebih modern. Tanpa adanya pendampingan

¹¹ M. Luthfi Hamidi, *Islamic Social Finance: Literasi, Inklusi, dan Pendampingan UMKM di Era Digital* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 142-150.

¹² Ahmad Fuad Fanani, *Inklusi Keuangan Syariah dan Relaksasi Kebijakan bagi UMKM di Sektor Agrikultur* (Malang: Inteligencia Media, 2024), hlm. 156-162.

¹³ Luthfi Hamidi dan Muhammad Ridhwan Achmad, *Literasi Keuangan Syariah dan Strategi Pemberdayaan UMKM di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 210-218.

yang spesifik terhadap sektor unggulan seperti industri pertanian dan pengolahan gula aren, para pelaku usaha hanya akan terjebak pada pasar tradisional yang jangkauannya sangat terbatas. Peran BSI sebagai motor pemberdayaan sangat diharapkan untuk memfasilitasi perluasan akses pasar dan digitalisasi usaha bagi para mitra binaannya.¹⁴

Sebagai penutup, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dampak nyata kehadiran BSI bagi kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil seperti Batulappa. Penelitian ini akan mengurai hambatan-hambatan fundamental, mulai dari faktor regulasi, kesiapan manajerial pelaku usaha, hingga pola pendampingan yang selama ini dilakukan. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan sebuah model pemberdayaan ekonomi syariah yang lebih inklusif bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Pinrang secara umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja faktor penghambat BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
3. Apa saja faktor pendorong BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

¹⁴ Nur S. Buchori, *Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Komoditas Lokal dan Digitalisasi UMKM* (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2024), hlm. 112-119.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam proses pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pembahasan serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dijadikan bahan tambahan pengetahuan bagi peneliti itu sendiri dan membandingkan tentang apa yang dipelajari di bangku perkuliahan dan lapangan.
 - b. Sebagai referensi yang bisa di jadikan bahan evaluasi bagi bank itu sendiri dalam memberikan bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah kepada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah dengan judul penelitian “Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19” hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BSI KC Sidoarjo A. Yani dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UMKM) memungkinkan bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan Murabahah.¹⁵

Pada penelitian diatas membahas tentang Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus bersama mereka terhadap peranan lembaga perbankan syariah dan objek penerima manfaatnya, yaitu UMKM, dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada tiga aspek subjek bank (umum vs. spesifik BSI), konteks waktu (krisis Pandemi vs. umum), dan variabel yang dikaji (fokus pada Pembiayaan vs. fokus pada Pemberdayaan yang lebih luas), serta Cakupan wilayah (umum vs. Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang).

¹⁵ Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah, “Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): hlm. 199.

Kedua, Siti Maria Ulfa Khabibah, menulis tentang “Struktur Modal Pada UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan Gang IV Kota Kediri”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskripsi dengan tujuan untuk menggambarkan sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi struktur modal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen struktur modal yang ada pada pelaku UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan adalah modal tabungan pribadi dengan alasan bahwa masih tergolong masyarakat yang *unbankable*.¹⁶

Pada penelitian diatas membahas tentang Struktur Modal Pada UMKM Tahu. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama sama menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai objek studi yang berupaya ditingkatkan atau dianalisis kinerjanya. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dalam hal fokus analisis dimana peneliti sebelumnya meneliti struktur modal (rasio utang dan modal sendiri) pada satu jenis UMKM yang sangat spesifik (Tahu) dalam lokasi mikro (Gang IV, Kota Kediri), menjadikannya analisis keuangan internal yang mendalam, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji peran kelembagaan (BSI) dalam pemberdayaan (pendanaan dan non-pendanaan) terhadap UMKM secara umum (tidak spesifik jenis usaha) dilokasi (Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang), yang merupakan analisis eksternal dan dampak yang lebih luas.

Ketiga, Puja Rahmadani F, menulis tentang “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)” Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil dan dampak usaha mikro dan menengah terhadap keberadaan Bank Syariah

¹⁶ Siti Maria Ulfa Khabibah, “Struktur Modal pada UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan Gang IV Kota Kediri” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 72.

KCP Sribhawono. Dari hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang diberi pembiayaan bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun pembiayaan diberikan kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha.¹⁷

Pada penelitian diatas membahas tentang Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama sama mengkaji peran kelembagaan perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui pendekatan studi kasus di lokasi spesifik. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada tiga aspek utama yaitu Fokus Lembaga, di mana penelitian sebelumnya meneliti BRI Syariah KCP Sribhawono (sebelum merger), sedangkan penelitian selanjutnya meneliti Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger. Adapun Fokus Variabel, di mana penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan usaha (yang dapat diukur dari pertumbuhan atau profitabilitas), sedangkan penelitian selanjutnya menekankan pada aspek yang lebih luas yaitu pemberdayaan (melibatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas), serta Cakupan Geografis yaitu perbandingan antara Kabupaten Lampung Timur dan Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Keempat, Nurul Azizah (2022) menulis tentang “Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Ciputat)”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian ini yaitu untuk

¹⁷ Puja Rahmadani F., “Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), hlm. 68.

mengevaluasi efektivitas produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI dalam meningkatkan skala usaha nasabah. Dari hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa BSI berperan sebagai fasilitator permodalan yang signifikan, namun keberhasilan pemberdayaan ekonomi tersebut sangat bergantung pada intensitas pendampingan yang diberikan pihak bank kepada debitur, bukan sekadar penyaluran dana semata.¹⁸

Penelitian di atas secara mendalam membahas mengenai peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM, yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian penulis dalam mengkaji peran perbankan syariah pasca-merger bagi masyarakat kecil, namun terdapat perbedaan mendasar pada tiga aspek utama. Pertama, pada konteks wilayah, penelitian sebelumnya berlokasi di wilayah urban seperti Ciputat (Tangerang Selatan), sedangkan penelitian ini berfokus pada karakteristik lokal Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang memiliki corak ekonomi pesisir. Kedua, dari sisi karakteristik nasabah, penelitian sebelumnya meninjau UMKM secara umum di perkotaan, sementara penulis lebih spesifik membedah potensi pemberdayaan pada sektor perdagangan kecil yang mendominasi di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Ketiga, terkait fokus kendala, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada efektivitas produk, sedangkan penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai hambatan administratif serta rendahnya literasi keuangan yang menjadi penghalang nyata bagi masyarakat lokal dalam mengakses layanan BSI.

¹⁸ Nurul Azizah, “Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Ciputat)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 85.

B. Tinjauan teori

1. Peran Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan syariah terbesar di Tanah Air yang lahir dari kebijakan strategis pemerintah melalui penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021, pembentukan BSI merepresentasikan upaya nasional untuk menyatukan kekuatan aset, modal, dan sumber daya manusia guna menciptakan entitas keuangan syariah yang kompetitif di kancah global. BSI diposisikan sebagai jangkar utama dalam ekosistem ekonomi halal Indonesia yang mampu melayani seluruh segmen nasabah, mulai dari UMKM hingga korporasi besar, dengan standar layanan internasional.¹⁹

Sebagai bank yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, BSI beroperasi dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemitraan, dan transparansi yang bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). BSI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan konvensional, tetapi juga mengemban misi sosial melalui pengelolaan dana kebajikan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Hal ini menjadikan BSI memiliki karakter unik sebagai lembaga perbankan yang bersifat inklusif atau *Rahmatan Lil 'Alamin*, yakni membawa manfaat bagi seluruh alam dan tidak terbatas hanya untuk nasabah Muslim saja.²⁰

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 12.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 56.

Dalam perkembangannya hingga tahun 2025, pengertian BSI telah bertransformasi dari sekadar bank hasil merger menjadi simbol modernisasi perbankan syariah digital. BSI kini dipahami sebagai entitas perbankan yang mengintegrasikan spiritualitas dengan teknologi mutakhir. Melalui penguatan infrastruktur digital dan perluasan jaringan, BSI berperan strategis dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan syariah nasional. Dengan demikian, BSI menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui pelayanan yang mengedepankan etika profesi dan keberlanjutan ekonomi.²¹

Berikut Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan ekonomi UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi strategis. BSI tidak hanya bertindak sebagai penyalur modal, tetapi juga sebagai pendamping dan akselerator bisnis bagi pelaku usaha kecil. Berikut adalah rincian peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM:

a. Peran Fasilitator Permodalan (Finansial)

Peran BSI sebagai fasilitator permodalan (finansial) yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah harus menjadi motor penggerak sektor riil melalui distribusi modal yang adil. Dalam peran ini, BSI bertindak menghapus hambatan akses pendanaan bagi UMKM dengan menyediakan produk pembiayaan yang terjangkau, seperti KUR Syariah, serta menggunakan akad kemitraan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang memposisikan bank sebagai mitra usaha, bukan sekadar kreditur. Hal ini bertujuan agar modal tidak hanya menumpuk pada korporasi besar saja, melainkan mengalir secara produktif kepada pelaku usaha kecil di tingkat masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten

²¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia* (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 45.

Pinrang, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bebas dari unsur riba.

b. Peran Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM)

Peran pendampingan dan edukasi dalam pemberdayaan ekonomi UMKM merupakan manifestasi dari fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal finansial semata, melainkan sangat bergantung pada kualitas individu yang mengelolanya. Melalui peran ini, BSI memberikan literasi keuangan syariah, pelatihan manajemen usaha, hingga bimbingan teknis seperti proses sertifikasi halal dan strategi pemasaran. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang memiliki kompetensi yang tangguh, mampu mengelola dana pembiayaan secara amanah, dan memiliki kemandirian ekonomi sehingga usaha mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan (naik kelas) dan tidak terjebak dalam kegagalan akibat minimnya pengetahuan manajerial.

c. Peran Akselerator Digital (Teknologi)

Peran akselerator digital (teknologi) dalam perbankan syariah merujuk pada upaya Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memodernisasi ekosistem UMKM melalui integrasi teknologi finansial yang inklusif. Digitalisasi merupakan instrumen krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan perbankan hingga ke lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (*unbanked*). Dalam praktiknya, BSI berperan sebagai fasilitator teknologi dengan menyediakan layanan seperti QRIS, *mobile banking*, dan platform pembiayaan digital yang memungkinkan pelaku UMKM melakukan pencatatan keuangan secara otomatis, mempercepat proses transaksi, serta

memperluas akses pasar di era ekonomi digital. Melalui peran ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pendorong transformasi UMKM dari manajemen tradisional menuju tata kelola usaha yang lebih profesional dan berdaya saing global.

d. Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf)

Peran sosial dan inklusi melalui instrumen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) menempatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memanifestasikan fungsi *manajer investasi* sekaligus *manajer sosial*. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan keuangan sosial Islam ke dalam sistem perbankan guna menjamin distribusi kekayaan yang merata dan membantu masyarakat ekonomi lemah yang belum layak mendapatkan pembiayaan bank (*unbankable*). Dalam praktiknya, BSI mengelola dana kebajikan melalui akad Qardhul Hasan dan pendayagunaan dana zakat produktif sebagai jaring pengaman ekonomi bagi pelaku UMKM mikro, sehingga tercipta inklusi keuangan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.²²

2. Teori Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Secara teoretis, pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan modal secara cuma-cuma, melainkan proses penguatan kapasitas (*capacity building*) yang mencakup aspek kognitif, psikologis, dan struktural. Dalam konteks UMKM di Kecamatan Batulappa

²² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 21.

Kabupaten Pinrang, pemberdayaan bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan dan kemiskinan dengan cara menumbuhkan aksesibilitas terhadap sumber daya produktif.²³

Peran lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah seperti BSI, menjadi katalisator dalam mempercepat proses pemberdayaan ini melalui skema pembiayaan yang berbasis kemitraan dan keadilan. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, pemberdayaan berbasis syariah menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang menyertai transaksi ekonomi. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih humanis antara bank dan pelaku UMKM, di mana pendampingan usaha (*mentoring*) menjadi bagian integral untuk memastikan dana yang disalurkan benar-benar berdampak pada eskalasi skala usaha masyarakat.²⁴

Strategi pemberdayaan yang efektif juga sangat bergantung pada identifikasi potensi lokal dan pemetaan tantangan yang spesifik di wilayah tersebut. Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, tantangan internal seperti rendahnya literasi keuangan dan manajemen usaha yang masih tradisional sering kali menjadi penghambat. Oleh karena itu, teori pemberdayaan modern menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek aktif yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi.²⁵

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 58.

²⁴ Ascarya, *Ekonomi dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 114.

²⁵ T. Mardikanto dan P. Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 202.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi UMKM pada akhirnya diukur dari adanya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian finansial yang signifikan. Secara teoretis, indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, serta kemampuan UMKM dalam menghadapi fluktuasi pasar. Dengan adanya dukungan yang sistematis dari lembaga keuangan syariah, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara makro.²⁶

Menurut Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita aspek utama dalam pemberdayaan ekonomi UMKM melibatkan tiga dimensi penting, yaitu:

1. Pemungkinan (*enabling*)

Aspek pemungkinan fokus pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, untuk berkembang. Dalam konteks ini, BSI berperan menciptakan "pintu masuk" melalui kebijakan perbankan yang inklusif dan ramah terhadap karakteristik usaha lokal. Pemungkinan ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini membuat masyarakat kecil takut atau sulit bersentuhan dengan bank syariah, sehingga tercipta titik awal bagi masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan potensi ekonomi yang mereka miliki.

2. Penguatan (*empowering*)

Aspek penguatan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang melampaui sekadar pemberian modal. BSI melakukan

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 58.

empowering dengan memberikan akses informasi, pelatihan manajemen usaha, dan edukasi literasi keuangan syariah kepada pelaku UMKM. Tujuannya adalah agar masyarakat Watang Soreang tidak hanya memiliki modal kerja, tetapi juga memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang mumpuni untuk mengelola usaha mereka secara mandiri, efektif, dan profesional.

3. Perlindungan (*protecting*)

Aspek perlindungan bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat serta eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dalam pemberdayaan ekonomi, BSI berfungsi sebagai pelindung dengan menyediakan skema pembiayaan yang adil (bagi hasil) dan menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir yang mencekik. Perlindungan ini memastikan bahwa pelaku UMKM di Watang Soreang tetap berdaya di tengah fluktuasi ekonomi dan tidak terjebak dalam siklus hutang yang merugikan, sehingga keberlanjutan usaha mereka tetap terjaga dalam jangka panjang.²⁷

Faktor penghambat pemberdayaan ekonomi UMKM yaitu:

1. Hambatan Struktural dan Aksesibilitas

Hambatan ini berkaitan dengan adanya sekat-sekat formal yang menyulitkan kelompok masyarakat bawah untuk menjangkau sumber daya ekonomi. Dalam konteks BSI di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hal ini tercermin pada ketidakmampuan sebagian pelaku UMKM mikro dalam memenuhi persyaratan administratif perbankan yang bersifat baku, seperti kelengkapan dokumen legalitas usaha atau ketersediaan agunan yang memadai. Kondisi ini

²⁷ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 159.

menciptakan jarak antara program yang ditawarkan bank dengan realitas kemampuan masyarakat di lapangan, sehingga potensi pemberdayaan tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan pelaku usaha.

2. Hambatan Kultural dan Rendahnya Literasi

Hambatan ini berkaitan dengan adanya sekat-sekat formal yang menyulitkan kelompok masyarakat bawah untuk menjangkau sumber daya ekonomi. Dalam konteks BSI di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hal ini tercermin pada ketidakmampuan sebagian pelaku UMKM mikro dalam memenuhi persyaratan administratif perbankan yang bersifat baku, seperti kelengkapan dokumen legalitas usaha atau ketersediaan agunan yang memadai. Kondisi ini menciptakan jarak antara program yang ditawarkan bank dengan realitas kemampuan masyarakat di lapangan, sehingga potensi pemberdayaan tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan pelaku usaha.

3. Kurangnya Pendampingan yang Berkelanjutan (*Monitoring*)

Pemberdayaan sering kali gagal karena hanya bersifat "pemberian bantuan" tanpa adanya pengawalan yang intensif. Suharto menekankan bahwa tanpa pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat cenderung kembali ke pola usaha lama yang tidak berkembang. Dalam kasus BSI, keterbatasan jumlah personil atau petugas lapangan (*Account Officer*) yang dapat menjangkau seluruh pelosok di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang secara rutin menjadi penghambat serius. Akibatnya, pelaku UMKM sering kali merasa ditinggalkan setelah menerima dana, sehingga kendala operasional yang muncul di tengah jalan tidak mendapatkan solusi

yang tepat, yang pada akhirnya dapat memicu risiko pembiayaan bermasalah.²⁸

Faktor pendukung dalam pemberdayaan ekonomi UMKM merupakan sekumpulan unsur atau kondisi positif, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi masyarakat. Secara teoretis, faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti akses permodalan yang mudah, kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi usaha. Keberadaan faktor pendukung ini sangat krusial karena berperan sebagai daya dorong (*driving force*) yang meminimalisir hambatan struktural, sehingga program pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga seperti BSI dapat terimplementasi secara lebih efektif dan efisien di lapangan.

Menurut Suharto faktor penunjang atau pendukung dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Faktor pendukung utama dalam keberhasilan pemberdayaan ini adalah adanya sinergi antara kebijakan inklusi keuangan perbankan syariah dengan karakteristik agamis masyarakat lokal. Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, nilai-nilai religiusitas masyarakat yang tinggi menjadi modal sosial (*social capital*) yang sangat kuat. Masyarakat cenderung lebih terbuka dan menaruh kepercayaan tinggi pada lembaga yang mengusung prinsip syariah karena dianggap selaras dengan keyakinan mereka. Hal ini memudahkan BSI dalam melakukan pendekatan, sosialisasi produk pembiayaan, serta

²⁸ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 159.

penanaman akad-akad perbankan yang berbasis keadilan dan bagi hasil, sehingga resistensi masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dapat diminimalisir.

2. Selain faktor sosiokultural, dukungan teknologi digital dan kemudahan akses informasi menjadi pendorong akselerasi pemberdayaan di lapangan. Kehadiran infrastruktur digital yang memadai di Kota Pinrang memungkinkan BSI untuk memperkenalkan sistem transaksi modern seperti *BSI Mobile* dan QRIS kepada pelaku UMKM. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah proses administrasi pembiayaan, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan transparan. Dengan dukungan teknologi, hambatan geografis dan birokrasi yang rumit dapat dipangkas, sehingga penyaluran modal usaha dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Faktor pendukung terakhir adalah adanya keberpihakan regulasi pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan subsidi bunga untuk sektor UMKM melalui bank syariah memberikan stimulus besar bagi masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang untuk mengembangkan usaha mereka dengan biaya modal yang sangat rendah. Dukungan regulasi ini menciptakan ekosistem yang kondusif di mana perbankan memiliki rasa aman dalam menyalurkan pembiayaan, sementara pelaku UMKM mendapatkan proteksi finansial dari jeratan rentenir. Kolaborasi antara kebijakan makro pemerintah dan eksekusi mikro oleh BSI inilah yang menjadi mesin

penggerak utama dalam meningkatkan skala ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.²⁹

C. Kerangka Konseptual

a. Peran BSI Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Berikut ini adalah pengertian dari peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM tersebut:

1. Peran Fasilitator Permodalan (Finansial)

Peran ini merupakan fungsi dasar perbankan sebagai lembaga intermediasi, namun dalam konteks syariah, fokusnya adalah pada keadilan distribusi modal. BSI tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi bertindak sebagai mitra strategis melalui skema pembiayaan yang variatif, seperti *Murabahah* untuk pengadaan alat pertanian atau *Mudharabah/Musyarakah* untuk bagi hasil usaha. Di wilayah Batulappa, peran ini krusial untuk memutus ketergantungan petani pada modal tengkulak dengan menyediakan KUR Syariah yang memiliki margin rendah dan angsuran yang fleksibel sesuai siklus panen, sehingga modal kerja dapat terserap secara produktif tanpa beban bunga yang memberatkan.

2. Peran Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM)

Pendampingan merupakan pembeda utama antara perbankan syariah yang ideal dengan perbankan konvensional. BSI memandang bahwa kegagalan UMKM seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya modal, melainkan kelemahan manajerial dan rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, BSI melalui program-program seperti *BSI UMKM Center* memberikan pelatihan pembukuan sederhana, edukasi

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 58.

mengenai pemisahan aset pribadi dan usaha, serta bimbingan sertifikasi halal. Di Batulappa, pendampingan ini diarahkan agar petani dan pengrajin gula aren mampu mengelola keuangan secara amanah dan profesional, sehingga usaha mereka memiliki fundamental yang kuat untuk "naik kelas".

3. Peran Akselerator Digital (Teknologi)

Dalam era ekonomi digital, BSI berperan sebagai jembatan teknologi bagi masyarakat pedesaan yang sebelumnya tidak terjangkau layanan formal (*unbanked*). Melalui penyediaan infrastruktur seperti QRIS untuk transaksi non-tunai dan aplikasi BSI Mobile, BSI mempercepat digitalisasi UMKM di Batulappa. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan transparan, yang pada gilirannya mempermudah bank dalam menilai kelayakan kredit (*credit scoring*) calon nasabah. Dengan demikian, teknologi bukan sekadar alat bayar, melainkan instrumen untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional usaha lokal di pasar yang lebih luas.

4. Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf)

Keunikan bank syariah terletak pada integrasi Keuangan Komersial dan Keuangan Sosial Islam. BSI mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu pelaku usaha mikro yang "belum layak bank" (*unbankable*) namun memiliki potensi. Melalui instrumen *Qardhul Hasan* (pinjaman kebajikan tanpa tambahan), BSI memberikan jaring pengaman bagi masyarakat miskin di Batulappa agar memiliki modal awal untuk memulai usaha kecil. Peran ini memastikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya menyasar mereka yang sudah mapan secara administratif, tetapi juga menyentuh lapisan

masyarakat paling bawah demi tercapainya keadilan ekonomi yang menyeluruh.³⁰

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan UMKM di wilayah seperti Batulappa merupakan manifestasi dari model Intermediasi Syariah Terintegrasi, yang mensinergikan aspek komersial dan sosial secara berkesinambungan. Melalui dimensi permodalan yang berkeadilan, pendampingan manajerial untuk penguatan SDM, akselerasi digital guna modernisasi usaha, serta pemanfaatan instrumen Ziswaf bagi kelompok *unbankable*, BSI tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Pendekatan holistik ini menjadi kunci untuk mentransformasi potensi lokal, seperti industri pertanian dan pengolahan gula aren, dari manajemen tradisional menuju tata kelola yang profesional, inklusif, dan berdaya saing global demi tercapainya kemaslahatan ekonomi umat yang berkelanjutan.

b. Ekonomi UMKM

Ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan pilar strategis dalam struktur perekonomian nasional yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial melalui penyerapan tenaga kerja yang masif dan pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Secara konseptual, ekonomi UMKM tidak hanya dilihat dari skala aset atau omzetnya, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan ketahanannya yang tinggi terhadap guncangan krisis global. Keberadaan

³⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Etika Bisnis Syariah: Implementasi dalam Perbankan Syariah dan Pemberdayaan UMKM* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 145-158.

UMKM menciptakan multiplier effect yang signifikan, di mana aktivitas produksi dan konsumsi di tingkat lokal mampu menstimulasi perputaran uang di daerah, sehingga memperkuat kemandirian finansial masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara makro.³¹

Menurut Tulus Tahi Hamonangan Tambunan (Tulus Tambunan), salah satu pakar ekonomi UMKM terkemuka di Indonesia, UMKM dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan orientasi dan kemampuannya:

1. *Livelihood Activities*: Usaha mikro yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah (sektor informal). Contoh: Pedagang kaki lima di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
2. *Micro Enterprise*: Usaha mikro yang memiliki sifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan yang kuat.
3. *Small Dynamic Enterprise*: Usaha kecil yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak serta ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*: Usaha menengah yang telah memiliki kewirausahaan yang matang dan siap bertransformasi menjadi usaha besar (*Big Enterprise*).³²

³¹ I. G. S. Pratama, *Analisis Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia: Transformasi Digital dan Ketahanan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2024), hlm. 72.

³² T. T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan ke Depan* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 45.

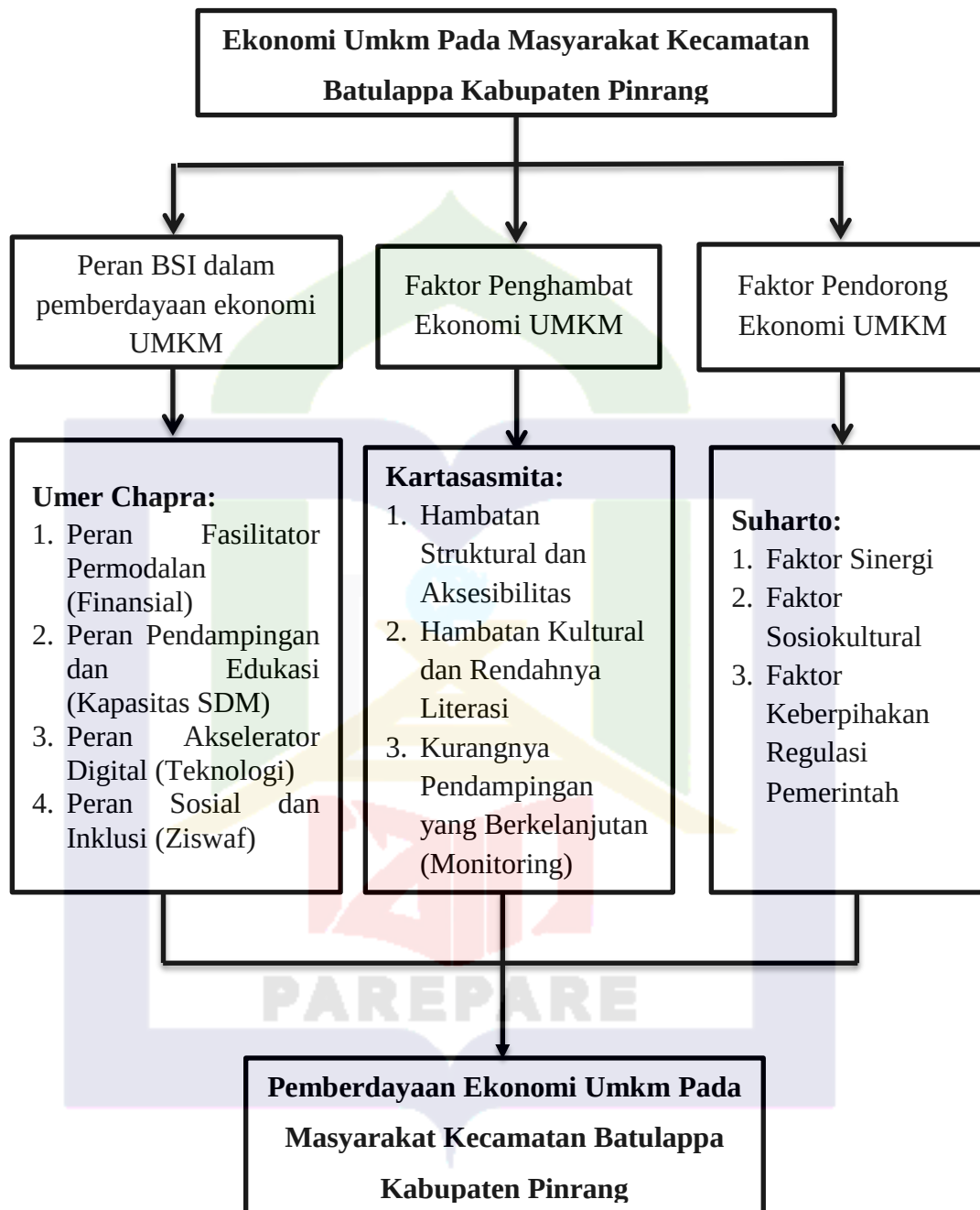
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan pemikiran tersendiri dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.³³

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



³³ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 34.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir diatas menjelaskan alur strategi pemberdayaan ekonomi UMKM Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, yang dipengaruhi oleh tiga pilar utama. Pilar pertama menyoroti peran Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan teori Umer Chapra yang mencakup penyediaan modal, pendampingan sumber daya manusia, percepatan teknologi digital, serta penguatan aspek social melalui inklusi ziswaf. Pilar kedua mengidentifikasi faktor pendorong menitikberatkan pada pentingnya sinegritas pemangku kepentingan, dukungan kondisi sosiokultural Masyarakat, serta kebijakan regulasi dari pemerintah yang berpihak pada pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, bagan ini juga memetakan berbagai faktor penghambat yang perlu diatasi berdasarkan teori Kartasmita, seperti kendala struktural, rendahnya literasi ekonomi, serta kurangnya monitoring atau pendampingan yang berkelanjutan. Seluruh elemen tersebut, baik peran lembaga keuangan, faktor pendukung, maupun tantangan yang ada, dianalisis secara terpadu untuk mencapai tujuan akhir yang tertera di bagian bawah bagan. Tujuan tersebut adalah terciptanya Pemberdayaan Ekonomi UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang lebih tangguh dan berkelanjutan melalui pendekatan yang sistematis dan terencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan memberikan gambaran tentang peristiwa, kegiatan atau aktivitas objek penelitian dimana implementasi data akan di ungkap dalam bentuk narasi yang akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang secara khusus akan mendalami fenomena yang diangkat dalam penelitian. Gambaran yang di maksud adalah penjelasan keterkaitan atas data yang ditemukan dengan subjektivitas peneliti.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini secara spesifik berfokus pada Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan tempat di mana program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pinrang dilaksanakan dan dapat diidentifikasi secara langsung.

³⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

Sementara itu, waktu penelitian yang direncanakan untuk proses pengumpulan data (termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen) akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan (dua bulan), bulan April-Mei. Periode waktu ini dipilih untuk memastikan ketersediaan waktu yang memadai guna mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif, sejalan dengan karakteristik penelitian studi kasus kualitatif.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi kontribusi strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema pembiayaan syariah di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyaluran modal usaha oleh BSI KC Pinrang dalam menstimulasi pertumbuhan skala usaha serta meningkatkan resiliensi ekonomi para pelaku UMKM lokal di kawasan tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang berjumlah 206 unit usaha berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kab. Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tangan pertama) di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif ini, data primer berupa informasi mendalam yang digali langsung oleh peneliti sebagai instrumen kunci melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data primer tersebut bersumber dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) serta para pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, untuk mendapatkan gambaran yang

holistik dan kontekstual mengenai proses pemberdayaan ekonomi yang terjadi.³⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber-sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran umum mengenai lokasi serta objek penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur atau jurnal ilmiah terkait pemberdayaan ekonomi, regulasi perbankan syariah, profil geografis Kecamatan Batulappa,³⁶ serta data statistik resmi mengenai jumlah dan perkembangan UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang.³⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yang meliputi berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara terbuka, observasi, dan pencatatan. Data tersebut dinilai berdasarkan keaslian teksnya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau perspektif individu terhadap suatu topik.³⁸ Dalam

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 4.

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Kecamatan Batulappa Dalam Angka 2025* (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2025), hlm. 5.

³⁷ Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, *Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pinrang Tahun 2025* (Pinrang: Dinas Koperasi dan UKM, 2025).

³⁸ Nur Setiawati, dkk. *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024). Hlm. 104.

wawancara ini, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan utama yang telah ditentukan sebelumnya sebagai panduan untuk mengeksplorasi informasi mendalam mengenai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang.

Proses tanya jawab dilakukan secara langsung kepada lima orang informan kunci yang terdiri dari: 1 (satu) orang pihak manajemen BSI KC Pinrang untuk memahami kebijakan dan strategi pembiayaan, serta 4 (empat) orang pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa yang merupakan nasabah BSI untuk mengetahui dampak nyata yang mereka rasakan terhadap peningkatan pendapatan. Teknik ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif berbagai kendala sosiologis maupun ekonomi yang dihadapi masyarakat lokal dalam mengakses modal syariah.

2. Observasi

Teknik observasi non-partisipan diterapkan dengan melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap fenomena ekonomi di lokasi penelitian³⁹ yaitu wilayah Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Peneliti mengamati aktivitas produktif harian pelaku UMKM, kondisi infrastruktur usaha pasca-menerima bantuan, serta interaksi antara nasabah dengan petugas lapangan BSI dalam proses pendampingan usaha. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat memperoleh data objektif mengenai perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan efektivitas implementasi program pemberdayaan BSI di lapangan tanpa melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 18.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai instrumen pelengkap untuk menghimpun data sekunder yang bersifat resmi dan tertulis guna memperkuat temuan lapangan. Teknik dokumentasi adalah langka yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa profil BSI KC Pinrang, laporan tahunan penyaluran pembiayaan UMKM, data statistik jumlah pelaku usaha di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, serta arsip foto kegiatan pendampingan ekonomi. Penggunaan dokumentasi ini berfungsi sebagai alat validasi data (triangulasi) yang menghubungkan antara kebijakan teoretis bank dengan realita administratif di tingkat lokal, sehingga analisis peran BSI memiliki landasan bukti historis dan statistik yang kuat.⁴¹

F. Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data melalui pengecekan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda mengenai peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan dan menyilangkan data yang diperoleh dari manajemen BSI KC Pinrang terkait kebijakan pembiayaan dengan pernyataan para pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa sebagai penerima manfaat, serta memperkuatnya dengan data sekunder dari laporan perkembangan ekonomi masyarakat setempat.⁴²

⁴⁰ Nova Christian Mamuaya, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Padang: Azzia Karya Bersama, 2025). hlm. 94.

⁴¹ M. Zulkifli, "Inklusi Keuangan Syariah bagi Masyarakat Pesisir dan Pedagang Kecil," *Jurnal Riset Ekonomi Modern* 10, no. 1 (2025): hlm. 15.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 18.

Melalui perbandingan perspektif antara penyedia layanan (bank) dan pengguna layanan (masyarakat), peneliti dapat memverifikasi konsistensi informasi mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan.⁴³ Teknik ini memastikan bahwa kesimpulan penelitian tidak hanya berlandaskan pada satu sudut pandang, melainkan representasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi syariah di Kota Pinrang.⁴⁴

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diterapkan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Peneliti memverifikasi hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan nasabah UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mengenai peningkatan pendapatan mereka dengan hasil observasi langsung terhadap kondisi fisik usaha serta dokumentasi transaksi atau laporan keuangan sederhana milik UMKM tersebut.⁴⁵ Jika data yang dihasilkan dari wawancara selaras dengan temuan pada saat observasi lapangan dan bukti dokumen pendukung, maka data tersebut dinyatakan kredibel dan valid.⁴⁶ Pendekatan ini berfungsi untuk meminimalisir bias subjektivitas peneliti serta memastikan bahwa peran BSI dalam pemberdayaan

⁴³ A. Pratama, "Analisis Strategi Pendampingan dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Ketahanan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): hlm. 54.

⁴⁴ M. Fauzi, *Evaluasi Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Perbankan Syariah di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 112.

⁴⁵ R. K. Sari, *Metode Observasi dalam Penilaian Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Akademik, 2022), hlm. 45.

⁴⁶ S. Nurhasanah dan H. Wijaya, "Peran Bank Syariah Indonesia dalam Transformasi UMKM di Era Digital: Studi Kasus Sulawesi Selatan," *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2023): hlm. 128.

ekonomi benar-benar terpotret secara objektif dan akurat dari berbagai instrumen pengambilan data.⁴⁷

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan merangkum dan memilah data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BSI dan pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, serta hasil observasi lapangan. Peneliti akan memfokuskan perhatian pada hal-hal pokok yang berkaitan langsung dengan bentuk pemberdayaan ekonomi, kendala yang dihadapi, serta peluang yang ada, sementara data yang tidak relevan dengan peran BSI akan dibuang. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dikelola, sehingga peneliti dapat menarik temuan awal mengenai bagaimana efektivitas pendanaan atau pendampingan yang diberikan BSI kepada masyarakat setempat.⁴⁸

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antar fenomena. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data akan mengelompokkan peran BSI ke dalam kategori tertentu seperti peran dalam pembiayaan modal, edukasi literasi keuangan, atau pendampingan usaha serta memetakan tantangan yang ditemukan di lapangan secara sistematis. Dengan penyajian yang terstruktur, peneliti dapat melihat gambaran utuh mengenai dinamika

⁴⁷ M. Zulkifli, "Inklusi Keuangan Syariah bagi Masyarakat Pesisir dan Pedagang Kecil," *Jurnal Ekonomi Modern* 10, no. 1 (2025): hlm. 15.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 18.

pemberdayaan ekonomi UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan mempermudah penarikan kesimpulan sementara.⁴⁹

3. Conclusion Drawing / Verification

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah disajikan, yang kemudian diikuti dengan proses verifikasi untuk menguji keabsahan simpulan tersebut. Peneliti akan mencari makna dari setiap data yang terkumpul, misalnya apakah peran BSI telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang atau masih bersifat administratif semata. Kesimpulan awal yang ditarik akan senantiasa diverifikasi dengan meninjau kembali catatan lapangan atau melakukan triangulasi data guna memastikan bahwa hasil penelitian ini kredibel, objektif, dan menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁵⁰

⁴⁹ M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), hlm. 33.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pinrang merupakan lembaga keuangan syariah utama yang memberikan akses permodalan sekaligus pembinaan bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang, termasuk di Kecamatan Batulappa.⁵¹ Wilayah Kecamatan Batulappa sendiri memiliki karakteristik geografis perdesaan yang khas dengan dominasi potensi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan hasil bumi.⁵² Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, kehadiran BSI di wilayah ini bertujuan untuk memberikan solusi finansial yang berlandaskan prinsip syariah guna meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan roda perekonomian masyarakat lokal.⁵³

Sektor UMKM di Kecamatan Batulappa sangat kompetitif namun membutuhkan sentuhan modal dan manajemen yang profesional agar dapat berkembang. Untuk membedakan diri dari lembaga keuangan konvensional atau non-formal, BSI menerapkan strategi pemberdayaan melalui empat peran utama: Fasilitator Permodalan (Finansial), Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM), Akselerator Digital (Teknologi), serta Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf).

⁵¹ PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Pinrang, “Profil Pembiayaan dan Data Penerima Manfaat Kontrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” (Dokumentasi Internal BSI KC Pinrang, 2025).

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Kecamatan Batulappa Dalam Angka 2025* (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2025), hlm. 23.

⁵³ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan 2025: Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2025), hlm. 112.

Langkah strategis utama untuk menjamin keberlanjutan ekonomi UMKM di Batulappa adalah dengan meningkatkan kapasitas usaha mereka melalui akses pembiayaan yang mudah dan berkah. Peningkatan pemberdayaan ini dihasilkan melalui integrasi program perbankan dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak *Micro Business Representative* (MBR) BSI serta nasabah UMKM, penerapan peran pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peran Fasilitator Permodalan (Finansial)

Salah satu komponen penting yang membedakan BSI dalam menarik minat nasabah UMKM adalah skema pembiayaan yang sesuai dengan kaidah Islam. BSI berkonsentrasi pada penyediaan produk seperti pembiayaan *Murabahah* (jual beli) dan *Mudharabah* (bagi hasil) yang memberikan rasa tenang bagi pengusaha kecil karena terhindar dari praktik riba. Selain itu, upaya dilakukan untuk memberikan persyaratan yang fleksibel dan tidak memberatkan, terutama bagi UMKM di wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan administrasi atau agunan.

Seperti yang diungkapkan oleh pihak *Micro Business Representative* (MBR) yaitu Bapak Suleman S. BSI dalam wawancaranya:

"BSI membedakan dirinya dari lembaga keuangan lain dengan pendekatan yang lebih personal dan syar'i. Salah satu yang paling penting adalah kami berusaha memenuhi permintaan nasabah, terutama pelaku UMKM yang memiliki siklus pendapatan musiman. Kami memberikan fleksibilitas pada sistem bagi hasil atau margin agar tidak mengganggu arus kas (*cash flow*) usaha mereka. Kebanyakan nasabah di Batulappa datang untuk mencari tambahan modal kerja guna membesarkan usaha tani atau dagang mereka dalam suasana yang aman dan berkah".⁵⁴

⁵⁴ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BSI memiliki peran vital sebagai fasilitator modal yang memiliki ciri khas syariah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan nasabah di pedesaan. BSI menawarkan berbagai kemudahan akses yang memungkinkan pelaku UMKM di Batulappa tetap menjaga keberlangsungan usahanya meskipun dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dengan memanfaatkan nilai-nilai religius masyarakat setempat, BSI berhasil menarik kepercayaan wisatawan ekonomi (nasabah) yang mencari keberkahan dalam menjalankan bisnisnya.

BSI menyediakan fasilitas pendampingan langsung (on-the-spot) yang menjadi salah satu nilai tambah utama bagi pelaku UMKM di Batulappa. Lokasi usaha nasabah yang berada di wilayah pedesaan dijangkau oleh petugas untuk memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan yang rapi dan sesuai standar syariah. Fasilitas pendampingan ini tidak hanya menarik minat calon nasabah yang ingin mendapatkan modal, tetapi juga mereka yang mencari bimbingan agar usahanya lebih profesional. Dengan adanya layanan jemput bola ini, BSI berhasil menciptakan hubungan kemitraan yang ideal, memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan yang mencari akses perbankan yang mudah, transparan, dan berkesan.

Pihak bank selalu berupaya untuk membuat layanan ini lebih menarik. Mengikuti permintaan pasar akan akses permodalan yang murah dan berkah melalui KUR Syariah terbukti meningkatkan jumlah nasabah, dan usaha untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat juga sering dilakukan. Selain itu, bagi pelaku UMKM yang datang untuk berkonsultasi singkat, kemudahan prosedur dan kejelasan akad menjadi tujuan utama mereka mendatangi pihak BSI.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM yang menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di KC Pinrang (Masyarakat Kecamatan Batulappa) dalam wawancara berikut:

"Daya tarik utamanya memang itu karena sistem syariah baru tidak ada ribanya. Selain itu, petugasnya juga di' we, sessa' tongeng mabbantu (rajin sekali membantu), apalagi pas mauki' ajukan modal. Ada juga itu program bantuan modal dari zakat, betul-betul mabbantu (membantu) sekali buat pedagang kecil yang baru mau memulai usaha".⁵⁵

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran utama BSI meliputi penyediaan modal yang berkah, pelayanan petugas yang komunikatif, serta fasilitas dana Ziswaf yang menarik bagi masyarakat yang baru merintis usaha.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat bahwa BSI memberikan layanan yang menyentuh berbagai sektor usaha di Kecamatan Batulappa, termasuk jasa pelayanan administrasi. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Makmur. Hamzah, salah satu pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Saya rasa memang unik sekali ini bank, karena pembiayaannya fleksibel betul ikuti hasil pendapatanku. Syarat-syaratnya juga gampang sekali dipenuhi bagi kami yang di desa ini. Tenang juga rasanya hatié karena tauki' toh kalau uang yang dipakai dikelola secara Islami."⁵⁶

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah menilai BSI sebagai lembaga yang solutif dengan skema pembiayaan

⁵⁵ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁵⁶ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

yang adaptif terhadap siklus usaha, serta memberikan ketenangan spiritual bagi pengusaha Muslim.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat bahwa BSI tidak hanya berperan dalam aspek permodalan, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas digital para pelaku usaha. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang:

"Iye', ada memang itu beberapa acara khusus nabiang (dibuatkan atau diadakan) bank, seperti sosialisasi QRIS baru pelatihan pembukuan sederhana. Menarik sekali itu acaranya karena bertambah mi pengetahuanta' tentang cara pakai HP untuk jualan sama terima pembayaran."⁵⁷

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya program pendampingan teknologi seperti pengenalan QRIS dan pelatihan manajemen menjadi daya tarik tambahan yang memperkuat peran BSI sebagai akselerator digital bagi UMKM lokal, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Batulappa. Strategi ini membantu para wirausaha untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi transaksi perbankan modern.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Aisyah.J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa yang juga menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Semenjak jadi nasabahnya BSI, sessa' terbantu tongeng ka' (betul-betul terbantu) dalam urusan transaksi, apalagi sekarang bisami pakai aplikasi di HP. Dulu kupikir susah sekali itu kalau berurusan sama bank baru banyak bunganya, tapi di BSI gampang dipahami penjelasannya baru sesuai

⁵⁷ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

syariah, jadi tenang mi hatita' kalau mau putar modal usaha".⁵⁸

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi wiraswasta seperti Ibu Nur Aisyah.J, peran BSI sangat dirasakan dalam mempermudah transaksi melalui digitalisasi perbankan serta memberikan edukasi yang menghapus stigma negatif terhadap birokrasi perbankan. Hal ini membuktikan bahwa strategi komunikasi dan layanan BSI mampu menjangkau berbagai lapisan wiraswasta di pedesaan guna mendukung kemandirian ekonomi mereka.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun materi edukasi sangat relevan dengan kebutuhan wiraswasta, keberhasilan peningkatan kapasitas SDM sangat bergantung pada kehadiran fisik pendamping di lapangan untuk memberikan arahan teknis.

Dari semua hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat di Kecamatan Batulappa, sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya yang menyediakan akses permodalan. Namun, keunikannya adalah BSI KC Pinrang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mengintegrasikan sistem pemberdayaan yang berbasis nilai-nilai spiritual dan sosial melalui pendampingan berkelanjutan.

Terdapat juga beberapa daya tarik utama yang membuat para pelaku UMKM memilih untuk menjadi nasabah dan bermitra dengan BSI, yaitu konsep pelayanan yang humanis, transparansi akad yang sesuai syariat, serta kemudahan akses teknologi perbankan digital yang membantu efisiensi usaha mereka di pedesaan. Hal ini

⁵⁸ Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat lokal bahwa usaha mereka didukung oleh lembaga yang mengedepankan keberkahan.

Daya tarik utama Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang dalam melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Batulappa terletak pada pendekatan pelayanan yang humanis serta komitmen terhadap prinsip syariah yang menenangkan hati nasabah.

BSI menawarkan kemudahan akses permodalan yang luas melalui skema KUR Syariah, proses administrasi yang transparan, serta pendampingan usaha yang intensif. Para pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan tenang tanpa rasa khawatir akan praktik riba, sambil mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan skala usaha mereka. Kejelasan akad dan suasana kemitraan yang profesional namun tetap mengedepankan nilai-nilai religius menjadikan BSI sebagai lembaga keuangan favorit bagi banyak wirausaha di Batulappa yang mencari keberkahan serta kemandirian ekonomi.

b. Peran Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM)

Pendampingan dan edukasi merupakan pilar penting dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Fokus utama dari peran ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar para pelaku usaha memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman prinsip syariah. Dengan adanya bimbingan yang berkelanjutan, tantangan dalam mengelola usaha dapat diminimalisir dan pelaku usaha menjadi lebih kompetitif.

Berdasarkan observasi peneliti, peran pendampingan BSI bagi masyarakat di Kecamatan Batulappa dilakukan melalui edukasi langsung saat kunjungan lapangan maupun sosialisasi di kantor.

Meskipun secara umum pendampingan ini dinilai sangat bermanfaat, terdapat tantangan dalam hal intensitas pertemuan serta pemahaman mendalam mengenai istilah-istilah teknis perbankan syariah bagi sebagian nasabah di wilayah perdesaan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Secara keseluruhan, mabbantu sekali memang itu pendampingan dari petugasnya bank. Dulu de'gaga kuisseng (tidak kutahu) cara pisahkan uang dapur sama uang jualan, tapi sekarang alhamdulillah mulai rapi mi catatanku. Tapi memang, karena kami di Batulappa agak mabela (jauh) ki' toh, jadi tidak bisa tiap hari itu bimbingannya. Kalau ada yang nallupai (dilupa), harus maki' lagi tunggu petugasnya datang".⁵⁹

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa edukasi keuangan dasar yang diberikan BSI memberikan dampak positif, namun intensitas pendampingan masih terbatas oleh jarak geografis.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Makmur Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Bagus memang edukasi dari petugasnya bank, apalagi soal cara kasih kembang ini usaha supaya bisa profesional. Tapi itu na, kadang-kadang terbatas sekali waktuta' kalau mau konsultasi di kantor karena sessa' rammé (ramai sekali) itu bank. Berharapka ada waktu khusus atau pertemuan rutin diadakan di wilayahta' di Batulappa, supaya bisa lebih fokus mi itu bimbingannya".⁶⁰

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah merasakan manfaat edukasi manajerial, namun diperlukan pengaturan

⁵⁹ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁶⁰ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

waktu dan tempat pendampingan yang lebih efektif agar informasi terserap dengan optimal.

Berikut wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Bagus memang bimbingannya BSI, apalagi kalau nairingangki' (diingatkan terus) soal ammana' (kejujuran) kalau mabaluk (menjual) ki' sesuai agama. Tapi itu na, buat kami ini iya matuami (yang sudah berumur), kadang sessa' maccai (susah sekali) mau dipahami itu istilah-istilah akad yang makasolang (rumit). Perlu memang penjelasan yang lebih gampang lagi, supaya naisseng tongeng ki' (kami paham betul) apa hak sama kewajiban".⁶¹

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang menyentuh sisi spiritual (SDM berkarakter syariah) sangat diapresiasi, namun metode komunikasi edukasi perlu disederhanakan agar mudah diterima oleh seluruh lapisan usia nasabah.

Terakhir, wawancara dengan Ibu Nur Aisyah.J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Mabbantu sekali memang itu pelatihan pembukuan 'nabiang' (diadakan atau dibuat) BSI untuk kembangkan usahaku. Tapi itu na, kalau mulai mi najejjelang (dijelaskan) fitur-fitur baru di HP untuk laporan keuangan, sessa' pusing ka' (pusing sekali saya) kalau tidak didampingi langsung. Pendampingan teknis yang begini memang yang sering terkendala, karena jarang-jarang ki' nalaoni (dikunjungi) petugas bank kalau di kampung".⁶²

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun materi edukasi sangat relevan dengan kebutuhan wiraswasta, keberhasilan peningkatan kapasitas SDM sangat bergantung pada

⁶¹ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁶² Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

kehadiran fisik pendamping di lapangan untuk memberikan arahan teknis.

Guna mengonfirmasi dan memberikan konter-narasi terhadap kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di pedesaan mengenai keterbatasan jarak, waktu, serta kerumitan literasi, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business Relationship* (MBR) Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pinrang yang menangani wilayah Kecamatan Batulappa. Beliau mengemukakan:

"Kami di pihak MBR BSI menyadari sepenuhnya bahwa wilayah Batulappa memiliki tantangan geografis yang cukup menyita waktu operasional. Oleh karena itu, strategi utama kami adalah menerapkan sistem layanan jemput bola atau *on-the-spot*. Terkait istilah akad yang dirasa rumit oleh nasabah yang sudah berumur, petugas kami di lapangan selalu diinstruksikan untuk menghindari bahasa teknis perbankan yang kaku. Kami mengedepankan pendekatan humanis, misalnya mengganti istilah *Murabahah* dengan penjelasan 'sistem jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal tanpa bunga'. Mengenai frekuensi kunjungan, keterbatasan jumlah personil *account officer* memang membuat bimbingan harian belum dinilai ideal oleh warga, sehingga saat ini kami memaksimalkan monitoring berkala dan berkolaborasi dengan ketua kelompok tani atau tokoh masyarakat setempat agar penyampaian informasi pembukuan dasar bisa tersambung secara berkelanjutan."⁶³

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BSI secara struktural telah berupaya memitigasi hambatan literasi dan jarak geografis melalui penyederhanaan bahasa komunikasi akad serta metode layanan jemput bola. Kendati demikian, terdapat pengakuan dari sisi internal perbankan mengenai keterbatasan jumlah personil lapangan jika dibandingkan dengan luasnya cakupan

⁶³ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

wilayah pemberdayaan di Kecamatan Batulappa, sehingga kemitraan lokal dengan tokoh masyarakat menjadi katup penyelamat untuk menjaga keberlanjutan program edukasi manajerial.

Dari hasil wawancara di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan dan edukasi (kapasitas SDM) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) bagi masyarakat Kecamatan Batulappa sudah tergolong memadai dan membawa perubahan pada cara pandang nasabah dalam mengelola usaha. Program seperti pembukuan sederhana dan literasi syariah memudahkan nasabah untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha yang lebih profesional. Namun, aspek frekuensi pendampingan dan penyederhanaan materi edukasi masih perlu perhatian khusus agar semua kelompok nasabah dapat meningkatkan kapasitas dirinya secara maksimal. Memperbaiki intensitas kunjungan dan metode komunikasi akan sangat meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM dan mendukung kemandirian ekonomi di Kecamatan Batulappa secara berkelanjutan.

Peran pendampingan dan edukasi (kapasitas SDM) yang diberikan oleh BSI kepada pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa masih memerlukan perhatian lebih. Meskipun program edukasi seperti literasi keuangan syariah dan pembukuan sederhana telah dilaksanakan, kendala dalam pemahaman istilah-istilah teknis perbankan dan keterbatasan manajerial dapat mengganggu optimalisasi usaha para pelaku UMKM.

Masalah ini menjadi perhatian khusus terutama bagi nasabah yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau mereka yang sudah lanjut usia, yang mungkin mengalami kesulitan dan ketidaktahuan saat mencoba menerapkan standar manajemen keuangan profesional di usahanya. Hambatan literasi ini, walaupun tidak menghalangi akses

pembiayaan sepenuhnya, dapat mempengaruhi perkembangan skala usaha nasabah dan menurunkan efektivitas pemberdayaan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi kunjungan pendampingan serta penyederhanaan metode edukasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemandirian ekonomi masyarakat di Kecamatan Batulappa, serta memastikan hasil pemberdayaan yang lebih baik bagi seluruh nasabah BSI.

c. Peran Akselerator Digital (Teknologi)

Peran akselerator digital mencakup penyediaan sarana teknologi yang memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan transaksi dan pengelolaan keuangan. Hal ini terdiri dari fasilitas seperti aplikasi *mobile banking* (BYOND/BSI Mobile), sistem pembayaran digital (QRIS), serta layanan perbankan elektronik lainnya. Implementasi teknologi di tingkat UMKM, seperti penggunaan QRIS di warung-warung atau pasar di Kecamatan Batulappa, akan membantu wirausaha merasa lebih modern dan efisien dalam melayani pelanggan. Selain itu, nasabah akan merasa lebih terbantu jika fitur-fitur pendukung usaha digital sudah tersedia secara lengkap dan mudah dioperasikan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah mulai memperkenalkan beberapa instrumen digital penting, seperti QRIS, untuk mendukung kemudahan transaksi nasabah UMKM. Namun, terdapat kekurangan signifikan dalam hal infrastruktur pendukung, terutama stabilitas jaringan internet di wilayah Batulappa. Meskipun ada fasilitas digital yang memadai dari sisi aplikasi, kurangnya jangkauan sinyal yang kuat menjadi masalah utama, terutama saat nasabah ingin melakukan transaksi real-time. Hal ini seringkali menyebabkan keluhan dari pelaku UMKM terkait ketidaknyamanan dan kegagalan sistem saat jaringan bermasalah. Pihak BSI perlu memperhatikan dan

meningkatkan edukasi serta koordinasi terkait infrastruktur ini agar pengalaman digital nasabah menjadi lebih baik dan memuaskan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Bagus memang ini aplikasi 'nabiang' (disediakan atau dibuat) BSI di HP (BSI Mobile), mabbantu sekali kalau mauki' cek uang masuk. Tapi itu na, ini sinyal di Batulappa sessa' tongeng ladde' (betul-betul sering sekali) hilang, jadi itu aplikasina kadang gannebang (sulit/tersendat) dibuka kalau di dalam rumah ki' atau pas di pasar yang kurang sinyalnya".⁶⁴

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BSI telah menyediakan fasilitas digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah, namun kendala jaringan internet di wilayah perdesaan menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penggunaan teknologi tersebut.

Wawancara dengan Bapak Makmur. Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Kalau untuk urusan transfer sama bayar-bayar, cuku'mi kupikir ini aplikasinya BSI. Tapi kalau itu alat pembayaran yang pake barcode (QRIS), mabela-bela pi (masih jarang sekali) pelanggan di sini yang pake. Mungkin harus ladde' lagi nadosang (disosialisasikan) ke warga, supaya kami yang jualan ini semangat to' maki' pake teknologi digital".⁶⁵

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas digital yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar karena rendahnya adopsi teknologi dari sisi pelanggan, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih masif.

⁶⁴ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁶⁵ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Deeng (ada) memang itu fasilitas digital seperti BSI Mobile, tapi kami ini iya matuami (yang sudah tua) sessa' maccai (susah sekali) rasanya kalau tidak didampingi langsung. 'Taeng' (tidak ada) menu yang lebih gampang khusus buat kami 'paballuk-balluk' matua (pedagang tua), supaya lengkap to' maki rasa' (jugalah kami rasakan) pakai HP, baru tidak 'mauta' (takut salah) pencet-pencet".⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun teknologi tersedia, kurangnya pendampingan teknis dan fitur yang ramah bagi pengguna lanjut usia dapat mengurangi efektivitas BSI sebagai akselerator digital bagi semua lapisan wirausaha.

Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah.J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Bagus memang kebersihan sistem transaksinya baru cepat sekali kalau lancar sinyal. Tapi itu na, masalah sinyal sama kuota internet di sini perlu memang diperhatikan ladde' (sekali) kalau mauki' semua pabaluk-baluk (pedagang) pake HP untuk jualan. Karena narekko de'gaga itu (kalau tidak ada itu), secanggih apa pun aplikasinya tetap jé sessa' maccai (susah sekali) kita' pake".⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keandalan sistem digital BSI sudah baik, tetapi faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur komunikasi di Batulappa memerlukan perhatian lebih agar layanan perbankan digital selalu lancar dan nyaman.

Guna menanggapi keluhan nasabah mengenai keterbatasan sinyal, rendahnya adopsi QRIS oleh pembeli setempat, serta kesulitan

⁶⁶ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁶⁷ Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

adaptasi bagi wirausaha lanjut usia, peneliti mewawancarai Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business Relationship* (MBR) Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pinrang. Beliau memaparkan langkah mitigasi dari sudut pandang perbankan:

"Terkait akselerasi digital di wilayah pelosok seperti Batulappa, kendala utama yang kami hadapi memang adalah *blank spot* atau tidak meratanya pemancar sinyal operator telekomunikasi yang menjadi faktor eksternal perbankan. Namun, BSI tidak tinggal diam; aplikasi terbaru kami seperti *BYOND* dirancang agar lebih ringan diakses pada kondisi jaringan tidak stabil. Menanggapi masukan Ibu Hj. Marnusi mengenai nasabah senior, petugas MBR kami secara berkala mengadakan edukasi *door-to-door* untuk mendampingi langsung aktivasi fitur interaktif yang ringkas. Sementara untuk perluasan ekosistem QRIS yang dikeluhkan masih sepi peminat oleh Bapak Makmur, kami terus menggencarkan program literasi inklusi keuangan digital tidak hanya kepada merchant atau pedagang, melainkan juga kepada komunitas pemuda, kelompok tani, dan masyarakat umum di Batulappa agar tercipta kesadaran transaksi nontunai yang sirkular."⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BSI menyadari adanya batasan infrastruktur eksternal dan terus berupaya mengoptimalkan keandalan sistem aplikasi. Selain itu, pihak perbankan mulai menekankan pentingnya edukasi digital secara dua arah (baik kepada pedagang maupun pembeli lokal) serta layanan bimbingan khusus untuk mengatasi gap pemahaman teknologi lintas generasi di Kecamatan Batulappa.

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran akselerator digital, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang disediakan BSI sebenarnya cukup beragam dan modern. Namun, terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal dukungan infrastruktur sinyal di lapangan,

⁶⁸ Suleman S, jabatan *Micro Business Relationship* (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

terutama di wilayah pelosok Batulappa. Edukasi digital sudah berjalan baik, tetapi perlu perawatan dan bimbingan lebih lanjut agar nasabah tidak merasa kesulitan saat terjadi kendala teknis. Selain itu, penyesuaian fitur aplikasi dan perluasan jaringan QRIS menjadi perhatian utama yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk pendampingan yang lebih intensif agar teknologi ini benar-benar menjadi solusi peningkatan ekonomi bagi UMKM di Kecamatan Batulappa.

d. Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf)

Daya tarik sebuah lembaga perbankan syariah akan sangat meningkat dengan adanya peran sosial yang nyata, seperti penyaluran dana Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) bagi pengusaha mikro yang belum memenuhi kriteria komersial perbankan (*unbankable*). Masyarakat cenderung lebih menaruh kepercayaan dan loyalitas kepada bank yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli pada kesejahteraan umat. Misalnya, bantuan modal usaha dari dana zakat atau infaq bagi pelaku UMKM yang kurang mampu dapat memberikan rasa aman dan harapan baru. Kepedulian BSI terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil ini menunjukkan peran inklusi keuangan yang dapat meningkatkan persepsi baik masyarakat terhadap BSI.

Berdasarkan observasi peneliti, di Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat implementasi peran sosial melalui bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah, ini menunjukkan proses penyaluran bantuan yang dilakukan secara tepat sasaran. Lokasi penyaluran biasanya melibatkan tokoh masyarakat agar lebih strategis dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan di pelosok Kecamatan Batulappa. Karena peran sosial ini, masyarakat merasa

bank hadir tidak hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai lembaga pelindung ekonomi umat.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Kulihat memang cukup peduli ini BSI dari segi sosialnya, karena selain nabiangki' (naberiakan kami) modal pinjaman, gaga to' ritu (ada juga itu) bantuan untuk 'pabaluk-baluk' (pedagang) yang biccu' sekali polé ri daka'na (dari zakatnya). Hal yang begini memang bikin kami ini iya pedagang biccu'é (kecil) merasa diperhatikan tongeng ki' (betul-betul diperhatikan) sama bank".⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, dapat disimpulkan bahwa layanan sosial BSI memberikan rasa aman dan dukungan moral yang kuat kepada pengusaha mikro, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Makmur Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Kulihat memang tidak pilih-pilih ini bank karena bukan ji nasabah besar nakejar. Itu dana Ziswaf nanalitutui (yang mereka kelola), mabbantu sekali memang kasih modal awal buat warga di sini iya marakka'é mau mappammula (baru mau mulai) usaha tapi de'gaga gappangna (tidak ada jaminannya) untuk nakeccringang (diagunkan)".⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Makmur Hamzah, dapat disimpulkan bahwa layanan sosial dan pengelolaan Ziswaf di BSI memadai dan sangat membantu meningkatkan inklusi ekonomi bagi masyarakat di tingkat bawah.

⁶⁹ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁷⁰ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Tenang memang rasanya hatita' di BSI karena tauki' toh kalau ada sebagian untungnya atau dananya dikelola untuk bantuan sosial sesuai syariat. Petugasnya juga sessa' maccai (pintar sekali) kalau kita' ini nasabah bisa to' maki' ikut berzakat lewat bank, supaya mabbantuki' juga sama sesama pabaluk-baluk (pedagang) di Batulappa".⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, dapat disimpulkan bahwa BSI menyediakan layanan sosial yang transparan dan informatif, sehingga meningkatkan kepuasan serta rasa kebersamaan antar nasabah.

Terakhir, hasil wawancara dengan Ibu Nur Aisyah. J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Aman sama berkah memang kurasa bermitra di sini, karena siap sekali ini BSI mabbantu pakai dana sosialnya narekko (kalau) ada masyarakat sessa' maccai (susah sekali) dapat modal usaha dasar. Petugasnya juga gercep (responsif) ladde'(sekali) najejjelangki'(menerangkan) informasi tentang ini program bantuan buat warga yang membutuhkan".⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aisyah J., dapat disimpulkan bahwa layanan peran sosial di BSI sangat baik dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat karena bank berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di pedesaan.

Guna memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, kriteria penentuan nasabah *unbankable*, serta bentuk akuntabilitas pengelolaan dana kebajikan tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business*

⁷¹ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁷² Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pinrang. Beliau memaparkan:

"Terkait implementasi fungsi sosial dan inklusi keuangan melalui instrumen ZISWAF, BSI memiliki program khusus yang terintegrasi dengan BSI Maslahat selaku lembaga amil zakat resmi kami. Untuk wilayah Kecamatan Batulappa, fokus penyaluran kami arahkan pada zakat produktif yang ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro yang secara kelayakan komersial belum masuk kategori *bankable* atau tidak memiliki agunan. Agar program ini tepat sasaran dan terhindar dari moral hazard, kami menetapkan kriteria asnaf yang jelas serta aktif berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa, maupun ketua kelompok tani setempat untuk memvalidasi kondisi riil calon penerima manfaat. Selain menyalurkan bantuan modal cuma-cuma, kami di pihak MBR juga memberikan edukasi dasar agar dana kebajikan tersebut benar-benar diputar untuk modal produktif usaha, bukan untuk konsumsi finansial jangka pendek. Melalui langkah inklusif ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran bank syariah dapat dirasakan sebagai mitra tumbuh bersama bagi seluruh lapisan masyarakat pelosok."⁷³

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran sosial BSI direalisasikan secara terstruktur melalui skema kemitraan strategis dengan lembaga filantropi internal (BSI Maslahat) dan pelibatan instrumen lokal. Penyaluran zakat produktif ini bertindak sebagai jembatan inklusi keuangan yang tidak sekadar memberikan bantuan konsumtif, melainkan menysasar pemulihan dan penguatan basis usaha terkecil masyarakat di Kecamatan Batulappa agar secara bertahap mampu mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM dan pihak perbankan, dapat disimpulkan bahwa peran sosial dan

⁷³ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

inklusi melalui Ziswaf di BSI KC Pinrang sudah terimplementasi dengan cukup memadai dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat Kecamatan Batulappa. Adanya penyaluran dana zakat dan infaq yang tepat sasaran menjadi faktor utama yang menambah daya tarik BSI sebagai bank syariah yang sesungguhnya. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana umat turut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, sosialisasi mengenai jangkauan program Ziswaf ini tetap perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat di pelosok desa dapat merasakan manfaat dari inklusi keuangan syariah ini secara maksimal.

2. Faktor penghambat dan faktor pendorong BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Efektivitas pemberdayaan ekonomi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kecamatan Batulappa dapat dicapai dengan memperhatikan faktor pendorong yang mendukung kelancaran program serta mengidentifikasi faktor penghambat yang perlu segera diatasi.

Keberhasilan BSI dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah ini sangat bergantung pada bagaimana bank mengoptimalkan potensi lokal (seperti nilai sosiokultural dan dukungan regulasi) serta memitigasi kendala di lapangan (seperti hambatan geografis dan literasi keuangan). Dengan menyeimbangkan kedua faktor ini, BSI dapat memastikan bahwa setiap program pembiayaan dan pembinaan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, adapun analisis mengenai faktor pendorong dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat mencakup tantangan teknis dan sosial yang memperlambat proses pemberdayaan. Berdasarkan temuan di lapangan, hambatan utama terdiri dari kendala struktural seperti kondisi geografis Kecamatan Batulappa yang cukup jauh dari pusat kota serta keterbatasan sinyal internet yang mengganggu operasional perbankan digital. Selain itu, hambatan kultural berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai akad-akad syariah juga menjadi tantangan dalam proses edukasi.

1. Hambatan Struktural dan Aksesibilitas

Hambatan struktural dan aksesibilitas mencakup segala bentuk kendala fisik dan sistemik yang menyulitkan pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa dalam mengakses layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara optimal. Hal ini meliputi jarak geografis yang jauh dari pusat layanan di kota Pinrang, infrastruktur jalan di beberapa titik desa, hingga keterbatasan akses teknologi atau sinyal internet. Sebagai wilayah yang berada di daerah perdesaan dan perbukitan, aksesibilitas menjadi faktor krusial karena tantangan fisik seringkali menjadi penghalang bagi kelancaran koordinasi dan transaksi perbankan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Kecamatan Batulappa memiliki tantangan aksesibilitas yang cukup signifikan. Meskipun secara umum jalan poros sudah memadai, namun jarak tempuh yang mencapai 33 km dari ibukota Kabupaten Pinrang memerlukan waktu sekitar 40-50 menit. Selain itu, akses digital yang menjadi bagian dari struktur layanan modern BSI masih belum merata di seluruh wilayah Batulappa, sehingga menghambat efektivitas pemberdayaan berbasis teknologi.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Kalau untuk urusan modal ke kantor BSI, bagus memang mi jalannya, tapi itu na mabela ladde' (jauh sekali) jaraknya. Kami di Batulappa harus memang sediakan waktu khusus kalau mauki' turun ke kota. Belum lagi struktur jaringan internet di sini sessa' kaco (kacau sekali) tidak stabil, jadi kalau mauki' pake layanan di HP, sering sekali nallattang (terhambat) gara-gara sinyal".⁷⁴

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak geografis dan keterbatasan sinyal internet di wilayah perdesaan menjadi hambatan struktural yang menghambat pelaku UMKM dalam menjangkau layanan BSI secara cepat dan efisien.

Wawancara dengan Bapak Makmur Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Gampang memang mi akses ke kantor cabang kalau ada kendaraanta', tapi tetap jé itu makan waktu ladde' (sekali). Hambatannya itu na, lebih ke infrastruktur pendukung di kampungta' yang belum memang mendukung untuk transaksi nontunai (pake kartu/HP). Jadi terpaksa maki' tetap sering turun ke kota kalau ada urusan administrasi mau nabiang (diurus atau dibuat)".⁷⁵

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun akses fisik tersedia, belum adanya infrastruktur pendukung layanan perbankan yang dekat di wilayah Batulappa memaksa nasabah

⁷⁴ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁷⁵ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

untuk tetap melakukan perjalanan jauh, yang menjadi beban tambahan dalam operasional usaha.

Wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Kalau kami ini, hamba' (hambatan) utamanya memang itu jarak sama faktor usiata' yang matuami (sudah tua). Sessa' maccai (capek sekali) rasanya badan kalau mauki' turun perjalanan jauh ke kantor BSI di kota. Belum lagi itu na, akses informasi digital di kampungta' karena sinyalé macceccé-ceccé (hilang-muncul), padahal melo' ladde' ki' (mau sekali kami) belajar cara pakai itu aplikasinya bank".⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan struktural berupa lokasi yang jauh dan akses digital yang terbatas menjadi kendala serius, terutama bagi wirausaha lanjut usia yang membutuhkan pendampingan lebih dekat di lokasi usaha mereka.

Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Akses jalan porosnya oke memang mi, tapi kalau masuk maki' ke area dalamnya Batulappa, hancur-hancur jalannya baru maggaluttu' (berbatu-batu). Hambatan sekali memang ini kalau mauki' nalaoni (dikunjungi) petugas bank, atau kalau kami yang mau keluar mengurus usahata'. Belum lagi itu na, urusan sinyal internet sessa' ladde' (sangat terbatas sekali) kurang di sini".⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di beberapa titik pedalaman Batulappa dan

⁷⁶ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁷⁷ Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

aksesibilitas sinyal internet yang buruk menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam proses pemberdayaan ekonomi oleh BSI.

Guna memperjelas komitmen perbankan serta langkah mitigasi dalam memotong rantai hambatan fisik (jarak ± 33 km, jalan rusak berbatu, dan minimnya sinyal internet) yang dikeluhkan oleh para pelaku UMKM di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business Relationship* (MBR) BSI Kantor Cabang Pinrang. Beliau mengungkapkan:

"Kami mengakui bahwa kondisi geografis Kecamatan Batulappa yang berada di area perdesaan dan perbukitan dengan jarak sekitar 33 km dari pusat kota menjadi tantangan struktural tersendiri, baik bagi nasabah maupun bagi kami petugas MBR yang harus melakukan peninjauan ke lokasi. Hambatan fisik berupa beberapa ruas jalan pedalaman yang rusak dan berbatu serta ketidakstabilan sinyal operator seluler memang sering memperlambat sinkronisasi data transaksi atau kunjungan langsung. Untuk mengatasi kendala aksesibilitas ini, BSI mengoptimalkan program perluasan Agen BSI Smart (Laku Pandai) di titik-titik strategis Batulappa agar nasabah tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk transaksi mendasar seperti tarik tunai atau transfer. Selain itu, tim MBR kami menerapkan jadwal kunjungan berkala yang terencana untuk menjemput berkas administrasi pembiayaan secara kolektif, sehingga meminimalkan beban biaya perjalanan dan waktu operasional usaha yang harus dikorbankan oleh nasabah kecil."⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BSI secara objektif membenarkan adanya hambatan struktural-geografis tersebut. Langkah penyelesaian konkrit dilakukan melalui perluasan ekosistem

⁷⁸ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

keagenan lokal (BSI Smart) serta sistem jemput bola berkala oleh tim MBR untuk memangkas jarak fisik dan hambatan administratif bagi masyarakat di Kecamatan Batulappa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM dan pihak perbankan, dapat disimpulkan bahwa hambatan struktural dan aksesibilitas di Kecamatan Batulappa masih menjadi kendala utama dalam program pemberdayaan BSI. Masalah jarak geografis, kondisi infrastruktur jalan di pelosok, serta keterbatasan sinyal internet menjadi tantangan fisik yang memengaruhi kenyamanan dan kecepatan transaksi nasabah. Meskipun layanan BSI dinilai baik, pengelola perlu mempertimbangkan peningkatan layanan jemput bola atau penyediaan agen laku pandai di wilayah Batulappa untuk memitigasi hambatan aksesibilitas ini agar pengalaman nasabah menjadi lebih baik dan inklusi keuangan dapat tercapai secara maksimal.

2. Hambatan Kultural dan Rendahnya Literasi

Hambatan kultural dan rendahnya literasi mencakup kendala yang berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan masyarakat, serta tingkat pemahaman terhadap sistem perbankan syariah. Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kecamatan Batulappa, hambatan ini seringkali muncul dalam bentuk stigma negatif terhadap birokrasi perbankan yang dianggap rumit, serta kurangnya literasi mengenai akad-akad syariah. Rendahnya pemahaman ini dapat mengurangi minat pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara maksimal, karena adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan mengelola administrasi atau ketakutan akan sistem yang belum mereka pahami sepenuhnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat di Kecamatan Batulappa secara umum memiliki karakteristik religius yang kuat, namun literasi mengenai produk perbankan syariah secara teknis masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi BSI, karena proses pemberdayaan tidak hanya soal pemberian modal, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir (*mindset*) agar pelaku usaha lebih melek finansial dan profesional dalam mengelola pembukuan usaha.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Mauta' ka' memang memula (awalnya takut sekali saya) berhubungan sama bank, karena kupikir sessa' maccai (susah sekali) prosedurnya baru jalloko' (banyak sekali) berkas mau nabiang (dibuat atau diurus). Kami di kampung biasa ji' pake cara-cara lama (tradisional). Biar ji' jadi nasabah maki' sekarang, kadang bingung laddeka rasanya (bingung juga saya rasanya) pisahkan mana uang modal usaha baru mana uang untuk keperluan dapur".⁷⁹

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan kultural berupa persepsi rumitnya birokrasi perbankan dan rendahnya literasi dalam manajemen keuangan dasar masih menjadi kendala bagi nasabah UMKM di pedesaan.

Wawancara dengan Bapak Makmur Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Kalau menurut saya, pahalang (hambatan) utamanya memang itu pemahamannya warga tentang ini sistem bagi hasil. Buda gajannapa (masih banyak sekali) yang belum napahang apa bedanya sama bunga bank biasa.

⁷⁹ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Kurang ladde'(sekali) memang literasi di kampung'ta', jadi orang sering ragu-ragu baru mauta' (takut) mau ambil modal besar karena de'gaga nassana (tidak ada kejelasan) di perhitungannya".⁸⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi mengenai akad dan sistem perbankan syariah menjadi hambatan yang membatasi optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha.

Wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Kalau kami ini pabaluk-baluk (pedagang) di kampung, de'gaga memang itu kebiasaan maccatai' (mencatat) setiap uang keluar. Pake sistem ingat-ingat ji' bawang (ingat-ingat saja). Jadi narekko (kalau) mintaiki' bank laporan pembukuan, sessa' maccai (susah sekali) rasanya. Kebiasaan atau budaya maccallu'ta' (budaya dagang lama kita) memang ini yang harus pelan-pelan diubah".⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya dagang tradisional yang tidak teradministrasi dengan baik merupakan hambatan kultural yang perlu diatasi melalui pendampingan intensif dari pihak bank.

Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Kadang itu istilah-istilah di bank syariah sessa' maringkeng (asing/aneh sekali) terdengar di telinga'ta'. Karena kurang ladde' (sekali) literasi, jadi masiri'-siri' maki' (minder/malu-malu) mau tanya-tanya lebih jauh. Perlu memang najejjelangki' (dijelaskan kepada kami) pake bahasa yang lebih gampang, supaya de'gaga rasa

⁸⁰ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁸¹ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

masiri'ta' baru tidak mauta' (takut salah) maki' kalau mau berurusan sama orang bank".⁸²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami serta rendahnya tingkat literasi nasabah dapat mengurangi kenyamanan dan keterbukaan nasabah dalam proses pemberdayaan ekonomi.

Guna mengonfirmasi hambatan non-fisik sosiokultural serta menjelaskan strategi pendekatan persuasif yang diambil perbankan dalam meruntuhkan stigma birokrasi dan kebiasaan dagang "ingat-ingatan" tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business Relationship* (MBR) BSI Kantor Cabang Pinrang. Beliau memaparkan:

"Tantangan kultural dan rendahnya literasi keuangan dasar memang menjadi salah satu agenda utama yang kami benahi di wilayah Batulappa. Kami sering menjumpai nasabah yang awalnya merasa minder atau takut berurusan dengan administrasi bank karena menganggap persyaratannya rumit. Menghadapi budaya dagang tradisional yang enggan melakukan pencatatan kas, tim MBR BSI bergerak menggunakan pendekatan kekeluargaan sosiokultural lokal. Kami mengedukasi mereka secara perlahan mengenai cara membuat pembukuan mini yang sangat sederhana, agar uang dapur tidak lagi bercampur dengan modal jualan. Kami juga menyiasati hambatan istilah akad syariah yang asing dengan memberikan analogi-analogi sehari-hari yang mudah dicerna, sehingga masyarakat tidak merasa bingung atau ragu lagi dalam membedakan sistem bagi hasil dengan bunga bank konvensional. Melalui pendekatan emosional yang ramah ini, perlahan-lahan *mindset* pelaku usaha di desa mulai bergeser ke arah manajemen keuangan yang lebih rapi dan profesional."⁸³

⁸² Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁸³ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BSI menyadari sepenuhnya eksistensi hambatan kultural masyarakat pedesaan dan berupaya melawannya lewat reformasi metode komunikasi. Pola pendampingan yang tidak kaku, penggunaan analogi sederhana untuk istilah akad, serta edukasi pembukuan praktis menjadi strategi konkrit MBR BSI dalam menembus sekat pembatas literasi finansial di Kecamatan Batulappa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM dan pihak perbankan, dapat disimpulkan bahwa hambatan kultural dan rendahnya literasi di Kecamatan Batulappa merupakan tantangan non-fisik yang signifikan dalam program pemberdayaan BSI. Masalah stigma birokrasi, kebiasaan pengelolaan keuangan yang belum profesional, serta pemahaman yang minim terhadap akad syariah menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Meskipun minat masyarakat terhadap label syariah tinggi, namun tanpa adanya peningkatan literasi yang masif, potensi pemberdayaan ekonomi tidak dapat berjalan secara penuh. Oleh karena itu, BSI perlu melakukan pendekatan yang lebih sosiokultural dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta meningkatkan frekuensi edukasi agar pelaku UMKM di Batulappa memiliki kemandirian ekonomi yang didasari pemahaman finansial yang kuat.

3. Kurangnya Pendampingan yang Berkelanjutan (Monitoring)

Pendampingan yang berkelanjutan dan pengawasan (*monitoring*) merupakan faktor krusial untuk memastikan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) benar-benar digunakan secara efektif untuk pengembangan usaha.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kecamatan Batulappa, pendampingan ini mencakup pemantauan berkala terhadap arus kas usaha, evaluasi perkembangan bisnis, hingga solusi atas kendala teknis yang dihadapi nasabah. Tanpa adanya monitoring yang intensif, pelaku UMKM di perdesaan seringkali merasa dibiarkan berjalan sendiri setelah menerima pencairan modal, yang berisiko pada stagnasi usaha atau ketidakdisiplinan dalam pengelolaan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, meskipun BSI telah memiliki program bimbingan, intensitas kehadiran petugas di lapangan untuk melakukan pemantauan di wilayah Kecamatan Batulappa masih dirasakan kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah kerja petugas dibandingkan dengan jumlah nasabah yang tersebar di pelosok, sehingga proses monitoring belum menyentuh seluruh lapisan UMKM secara rutin dan mendalam.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Gaga (ada) memang mi bimbingan polé ri (dari) BSI sejauh ini, tapi belum rutin ladde' (sekali). Mabbantu sekali memang kurasa kalau turun langsung petugas bank maccila-cila (melihat-lihat) usahata'. Tapi itu na, jarang-jarang pi nalaoni maki' (dikunjungi) untu' mamantau atau sekadar tanya kabar usaha, biasa sekali-sekali ji' bawang (hanya) kalau ada urusan berkas mau nabiang (diurus atau dibuat)".⁸⁴

⁸⁴ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program pendampingan sudah tersedia, namun kurangnya frekuensi kunjungan lapangan (monitoring) membuat nasabah merasa dukungan berkelanjutan dari pihak bank belum optimal.

Wawancara dengan Bapak Makmur Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Cepat memang mi kalau urusan modal, tapi narekko (kalau) cair mi, jarang-jarang maki' nalaoni (dikunjungi) lagi untuk diajari cara mengelola usaha lebih lanjut. Perlu memang ki' nannitutui (diawasi/dijaga) baru dibimbing secara berkala, supaya natauki' toh kalau ini cara maccata'ta' (cara mengelola uang kita) betul mi atau belum. Karena kalau jarang-jarang dimonitor, sering sekali kembali ke cara lama yang sessa' kaco (kacau sekali/tidak teratur)".⁸⁵

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan pasca-pembiayaan menjadi celah yang membuat pelaku UMKM sulit mempertahankan profesionalitas dalam pengelolaan usaha.

Wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Soro macai (baik sekali) memang petugas bank, tapi kayaknya sessa' sibu' ladde' (sibuk sekali) ki' di kantor kota. Kami yang di kampung ini perlu memang sering-sering naringngerangki' (diingatkan) baru nannitutui (dipantau) pembukuantu'. Karena kalau jarang-jarang ki' nalaoni (dikunjungi) untuk monitoring, kami yang matuami (sudah tua) sering sekali teddu' (lupa) cara maccatai' (mencatat) keuangan yang 'najejjelangki' (pelajaran atau informasi yang pernah diterangkan/dijelaskan) dulu".⁸⁶

⁸⁵ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁸⁶ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa monitoring yang berkelanjutan sangat diperlukan, terutama bagi nasabah lanjut usia, untuk menjamin konsistensi hasil dari edukasi yang telah diberikan sebelumnya.

Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Gaga (ada) memang mi fasilitas bimbingannya, tapi monitoring-nya yang sessa' ladde' (sangat kurang sekali). Pas ada kendala nakenna (tertimpa) usahata', harus maki' tajeng (menunggu) lama ladde' (sekali) baru bisa datang petugas bank ke sini. De'gaga memang pengawasan rutin, jadi bikin ma'boko hatinna (kurang semangat) warga untuk pake itu cara-cara baru dalam berbisnis".⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendampingan teknis secara langsung di lapangan dapat menurunkan motivasi dan kepuasan nasabah dalam mengikuti program pemberdayaan ekonomi.

Guna mengonfirmasi hambatan non-fisik sosiokultural serta menjelaskan strategi pendekatan persuasif yang diambil perbankan dalam meruntuhkan stigma birokrasi dan kebiasaan dagang "ingat-ingatan" tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business Relationship* (MBR) BSI Kantor Cabang Pinrang. Beliau memaparkan:

"Tantangan kultural dan rendahnya literasi keuangan dasar memang menjadi salah satu agenda utama yang kami benahi di wilayah Batulappa. Kami sering menjumpai nasabah yang awalnya merasa minder atau takut berurusan dengan administrasi bank karena menganggap persyaratannya rumit. Menghadapi budaya dagang tradisional yang enggan melakukan pencatatan

⁸⁷ Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

kas, tim MBR BSI bergerak menggunakan pendekatan kekeluargaan sosiokultural lokal. Kami mengedukasi mereka secara perlahan mengenai cara membuat pembukuan mini yang sangat sederhana, agar uang dapur tidak lagi bercampur dengan modal jualan. Kami juga menyiasati hambatan istilah akad syariah yang asing dengan memberikan analogi-analogi sehari-hari yang mudah dicerna, sehingga masyarakat tidak merasa bingung atau ragu lagi dalam membedakan sistem bagi hasil dengan bunga bank konvensional. Melalui pendekatan emosional yang ramah ini, perlahan-lahan *mindset* pelaku usaha di desa mulai bergeser ke arah manajemen keuangan yang lebih rapi dan profesional."⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BSI menyadari sepenuhnya eksistensi hambatan kultural masyarakat pedesaan dan berupaya melawannya lewat reformasi metode komunikasi. Pola pendampingan yang tidak kaku, penggunaan analogi sederhana untuk istilah akad, serta edukasi pembukuan praktis menjadi strategi konkrit MBR BSI dalam menembus sekat pembatas literasi finansial di Kecamatan Batulappa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM dan pihak perbankan, dapat disimpulkan bahwa hambatan kultural dan rendahnya literasi di Kecamatan Batulappa merupakan tantangan non-fisik yang signifikan dalam program pemberdayaan BSI. Masalah stigma birokrasi, kebiasaan pengelolaan keuangan yang belum profesional, serta pemahaman yang minim terhadap akad syariah menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Meskipun minat masyarakat terhadap label syariah tinggi, namun tanpa adanya peningkatan literasi yang masif, potensi pemberdayaan

⁸⁸ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

ekonomi tidak dapat berjalan secara penuh. Oleh karena itu, BSI perlu melakukan pendekatan yang lebih sosiokultural dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta meningkatkan frekuensi edukasi agar pelaku UMKM di Batulappa memiliki kemandirian ekonomi yang didasari pemahaman finansial yang kuat.

b. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan elemen yang memperkuat peran BSI di tengah masyarakat. Hal ini mencakup nilai sosiokultural masyarakat Batulappa yang religius, sehingga label "Syariah" menjadi daya tarik utama yang membangun kepercayaan nasabah. Selain itu, sinergi dengan pemerintah melalui program KUR Syariah serta kedekatan emosional melalui pelayanan petugas yang menjunjung tinggi sopan santun khas lokal menjadi penggerak utama meningkatnya minat wirausaha untuk bermitra dengan BSI.

1. Faktor Sinergi

Fasilitas layanan yang terintegrasi dan kolaborasi yang berkualitas meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah selama bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Faktor sinergi ini terdiri dari kerja sama yang harmonis antara pihak bank, nasabah UMKM, pemerintah setempat, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Batulappa. Membangun jejaring yang kuat dan sistem pendampingan yang melibatkan berbagai pihak akan membantu nasabah merasa lebih betah dan aman dalam mengembangkan usahanya bersama BSI. Selain itu, nasabah akan merasa lebih terbantu jika sinergi ini diwujudkan melalui program-program yang nyata dan mudah diakses di tingkat desa.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah mulai membangun sinergi penting melalui kegiatan pertemuan kelompok nasabah

untuk mendukung kenyamanan dan keterbukaan informasi. Namun, masih terdapat ruang untuk penguatan sinergi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan agen-agen laku pandai di pelosok. Meskipun kolaborasi dalam penyaluran modal sudah memadai, penguatan sinergi dalam pengawasan usaha secara bersama menjadi peluang utama untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Pihak bank perlu memperhatikan dan terus meningkatkan hubungan kerja sama ini agar ekosistem ekonomi syariah di Batulappa menjadi lebih solid dan memuaskan bagi semua pihak.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM nasabah BSI di Kecamatan Batulappa:

"Ku rasami memang gaga (ada) kerja sama yang soro macai (bagus sekali) antara kami pabaluk-baluk (pedagang) sama pihak BSI. Sering sekali petugas bank nalaoni maki' (datang mengunjungi kami) baru massilele (berdiskusi) tentang apa memang paling naperlluang (dibutuhkan) usahata' di kampung ini. Ini sinergi bikin kurasa tidak makkaleng-kaleng maki' (tidak berjalan sendirian) mau majukan usahata".⁸⁹

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BSI telah membangun faktor sinergi yang positif untuk memenuhi kebutuhan informasi dan dukungan bagi nasabah UMKM di Kecamatan Batulappa.

Wawancara dengan Bapak Makmur Hamzah, pelaku usaha fotokopi yang menjadi nasabah BSI KC Pinrang:

"Kurasami memang sinerginya bank sama kami pabaluk-baluk (pelaku usaha) di sini, apalagi pas pengurusan

⁸⁹ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

administrasi sessa' nassana (jelas sekali) dibantu karena lancar ladde'(sekali) komunikasinya. Harapanta' ke depannya, melo' ladde' ki' (mau sekali kami) ada kerja sama lanjutan seperti pelatihan bersama yang pakke-dinas (melibatkan dinas terkait), supaya itu daya tariknya bermitra sama BSI sessa' tonji' (semakin kuat sekali)".⁹⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor sinergi yang ada saat ini sudah cukup baik, namun terdapat harapan untuk memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal guna memberikan pengalaman usaha yang lebih menarik dan lengkap.

Wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa:

"Kucila-cila (saya lihat-lihat) memang 'gaga' (ada) kekompakan antara nasabah sama petugas bank narekko (kalau) ada pertemuan. Sinergi yang saling makkatawi (saling percaya) begini penting ladde'(sekali) memang. Tapi itu na, belum 'gaga kucila' (ada kulihat) kerja sama khusus yang pakke kelompok (melibatkan kelompok usaha) secara luas, padahal kalau gaga (ada), pasti sessa' tonji' (semakin lengkap sekali) rasanya usahata' di sini".⁹¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sinergi dasar sudah terbentuk, penguatan kolaborasi dalam kelompok usaha dapat meningkatkan daya tarik nasabah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih menyeluruh.

Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah J, selaku wiraswasta di Kecamatan Batulappa:

"Itu sinergi yang nabikin petugas bank sama toma' (tokoh masyarakat) di Batulappa sessa' maccai (memudahkan sekali) bikin kami makkatawi (percaya) sama programnya BSI. Tapi itu na, sinergi dalam hal bantuan

⁹⁰ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁹¹ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

teknis pemasaran digital (pake HP/medsos) sessa' ladde' (sangat kurang sekali), perlu memang ditingkatkan supaya usahata' lebih nassani (lebih dikenal/jelas) tau di luar".⁹²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergi sosiokultural sudah sangat baik, tetapi kekurangan dalam sinergi pendampingan teknis masih menjadi peluang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pengalaman nasabah.

Guna memperjelas peta kemitraan strategis perbankan serta menanggapi harapan nasabah mengenai perluasan kelompok usaha, pendampingan pemasaran digital, dan kolaborasi lintas dinas/sektor, peneliti meminta penjelasan dari Bapak Suleman S. selaku pihak *Micro Business Relationship* (MBR) BSI Kantor Cabang Pinrang. Beliau memaparkan:

"BSI sangat memprioritaskan faktor sinergi sebagai mesin penggerak keberhasilan inklusi ekonomi syariah di Batulappa. Sadar akan keterbatasan personil internal, kami secara konsisten merangkul perangkat pemerintah kecamatan, kelurahan, serta jajaran penyuluh lapangan untuk mempermudah koordinasi serta validasi kelompok usaha potensial. Menanggapi aspirasi para nasabah mengenai kebutuhan pelatihan digital marketing dan wadah kelompok usaha yang terpadu, BSI saat ini tengah merumuskan program kemitraan terintegrasi. Kami berencana menggandeng dinas koperasi dan UMKM daerah serta komunitas pegiat digital lokal untuk mengadakan lokakarya berkala. Sinergi multipihak (*triple helix*) ini bertujuan agar para pelaku usaha di pelosok Batulappa tidak sekadar memperoleh suntikan pembiayaan, tetapi juga mampu naik kelas melalui penguasaan pasar digital (*e-commerce*). Melalui optimalisasi jejaring agen BSI Smart yang berbasis

⁹² Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

masyarakat lokal, kami optimistis ekosistem kolaborasi ini akan semakin kokoh dan mandiri."⁹³

Dari hasil wawancara dengan pihak perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BSI menempatkan aspek sinergi sebagai strategi inti dalam perluasan jangkauan pemberdayaan ekonomi. Komitmen institusi diperlihatkan melalui rencana perwujudan kerja sama lintas sektor dengan dinas pemerintahan dan penguatan ekosistem digital guna memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor sinergi di Kecamatan Batulappa, dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja sama yang terjalin antara BSI dan nasabah sudah cukup beragam dan harmonis. Namun, terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas sinergi dalam hal pendampingan teknis dan kolaborasi lintas sektor, terutama saat volume aktivitas ekonomi meningkat. Kebersihan komunikasi antara pihak bank dan nasabah umumnya baik, tetapi perlu perawatan hubungan yang lebih intensif di tingkat lapangan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat sinergi ini agar dapat memenuhi harapan pelaku UMKM serta meningkatkan daya tarik pemberdayaan ekonomi syariah di wilayah tersebut.

2. Faktor Sosiokultural

Nilai-nilai sosial dan budaya yang religius pada masyarakat Kecamatan Batulappa menjadi daya tarik utama (Unique Selling Point) bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperluas jangkauan layanannya. Kepercayaan masyarakat terhadap label

⁹³ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

"Syariah" serta pola komunikasi petugas bank yang mengedepankan kearifan lokal menjadi dorongan kuat bagi pelaku UMKM untuk menjadi nasabah.

Hasil wawancara terkait faktor sosiokultural ini dipaparkan sebagai berikut:

Ibu Risna Arisanti, salah satu pelaku UMKM di Batulappa, mengungkapkan:

"Alasan utamaku memang mélé'i (memilih) BSI karena gaga (ada) label syariahnya. Kami sebagai warga di sini, sessa' perlu ladde' (sangat penting sekali) itu sistem yang de'gaga ribana (bebas riba), karena bikin maredde' hatitta' (bikin tenang hati) baru makkatawi ki' (yakin kami) kalau ini usahata' nabeangngi (diberikan) keberkahan".⁹⁴

Hal senada disampaikan oleh Bapak Makmur Hamzah, pemilik usaha fotokopi, mengenai pendekatan pelayanan bank:

"Soro macai memang (bagus sekali) cara komunikasinya petugas bank, mapato baru marenni' (sopan dan halus). Pakeki' bahasa sama sopan santun yang mappalebbi (menghargai/memuliakan) budayata' di kampung, jadi hase' (muncul) itu rasa saling makkatawi (saling percaya). Itu memang bikin de'gaga (tidak ada) ragu-raguta' mau makkasituru (bekerja sama) urusan modal usaha".⁹⁵

Sementara itu, Ibu Hj. Marnusi menekankan pentingnya modal sosial dan kearifan lokal dalam menjaga kedisiplinan nasabah:

"Sessa' maccai (kuat sekali) memang itu rasa sipasirung (kekeluargaan) di Batulappa ini. Petugas bank sering ladde'(sekali) makkasituru (berkoordinasi) sama toma'

⁹⁴ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁹⁵ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

(tokoh masyarakat) baru ketua kelompokta'. Jadi itu rasa masiri'-siri'ta' (rasa tidak enak/sungkan) sama tetangga dan toma'(tokoh masyarakat), yang malah bikin sessa' majjappa (semakin semangat) baru pato' ki' (disiplin) bayar setoran tepat waktu".⁹⁶

Ibu Nur Aisyah J, selaku wiraswasta, menambahkan mengenai efektivitas sosialisasi berbasis religi:

"Karena sessa' makkatenni (teguh beragama/religius) memang warga di sini, jadi narekko (kalau) najejjelangi' (dijelaskan) tentang sistem bagi hasil atau transaksi yang pakai syari'ah (sesuai tuntunan Islam), sessa' maccai (mudah sekali) naterima akaseng (diterima akal/hati) dibanding bank biasa. Ini memang bikin warga yang dolona mauta' (takut salah) ke bank, hase' (muncul) rasa mapattonangna (merasa diterima/diorangkan) kurasa".⁹⁷

Dari sisi perbankan, Bapak Suleman S. selaku *Micro Business Relationship* (MBR) BSI, membenarkan bahwa pendekatan budaya dan agama ini merupakan strategi utama BSI dalam merangkul pelaku usaha mikro di wilayah tersebut:

"Kami di BSI menyadari bahwa masyarakat Batulappa memegang teguh nilai-nilai agama dan adat. Oleh karena itu, pendekatan yang kami lakukan tidak kaku atau semata-mata bisnis. Kami memosisikan diri sebagai mitra yang ingin membantu usaha mereka tumbuh secara berkah. Menggunakan bahasa daerah, menghormati tokoh masyarakat, dan menjelaskan akad syariah secara sederhana adalah kunci kami dalam membangun kedekatan dan meruntuhkan jarak psikologis dengan nasabah UMKM."⁹⁸

⁹⁶ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁹⁷ Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

⁹⁸ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, *wawancara pribadi*, 07 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sosiokultural berupa nilai religius (anti-riba), pendekatan komunikasi berbasis kearifan lokal, pemanfaatan modal sosial (tokoh masyarakat), serta strategi jempit bola yang adaptif dari pihak bank menjadi pendorong utama keberhasilan pemberdayaan ekonomi UMKM oleh BSI di Kecamatan Batulappa. Budaya saling percaya (*trust*) dan keinginan untuk mencari keberkahan dalam berdagang menciptakan ekosistem perbankan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah pedesaan tersebut.

3. Faktor Keberpihakan Regulasi Pemerintah

Kebijakan pemerintah melalui regulasi yang mendukung sektor syariah menjadi motor penggerak utama dalam perluasan akses modal bagi pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa. Sinergi antara program subsidi margin dari pemerintah pusat dengan kemudahan administrasi di tingkat lokal memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor keberpihakan regulasi ini dijelaskan oleh para informan sebagai berikut:

Ibu Risna Arisanti, selaku pelaku UMKM di Batulappa dan nasabah BSI, mengungkapkan:

"Mabbantu sekali memang kurasa sama pabaluk-baluk (pedagang) lain di Batulappa ini program KUR Syariah polé ri (dari) pemerintah. Karena gaga (ada) itu subsidi marginnya, jadi biaya tambahan modal sessa' canni' ladde' (murah sekali/enteng sekali) baru na-gapi (terjangkau) untuk usaha macaddi' (usaha kecil) kayak kami ini".⁹⁹

⁹⁹ Risna Arisanti, nasabah wiraswasta BSI, wawancara pribadi, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Makmur Hamzah, pemilik usaha fotokopi yang juga nasabah BSI:

"Sessa' (sangat) lancar memang kurasa urusan ke bank karena pihak kelurahan sama kecamatan di sini mabbantu tonji' (ikut membantu) mempermudah urusan sura'-sura' (surat-menyurat) baru berkas yang dibutuhkan. Ini dukungan polé ri (dari) perangkat desa bikin maredde' hatitta' (bikin tenang hati) narekko (kalau) mauki' makkasituru (mengajukan/bekerja sama) bantuan modal ke BSI".¹⁰⁰

Ibu Hj. Marnusi, seorang wirausaha di Kecamatan Batulappa, menambahkan mengenai ketepatan sasaran regulasi tersebut:

"Sessa' situju memang (sangat tepat sasaran) kurasa ini program bantuan modal polé ri (dari) BSI yang narekke' (didukung) pemerintah, karena mampasai (menyasar) sektor usaha utama di sini, seperti papula-pula (petani) sama pabaluk-baluk (pedagang) hasil bumi. Cocoki' ladde' (cocok sekali) sama apa yang dibutuhkan kampungta' untuk majukan ekonomi di desa".¹⁰¹

Sementara itu, Ibu Nur Aisyah J, yang juga aktif sebagai wiraswasta, menyatakan:

"Sering sekali memang nampasilaongki' (mengajak kami bersama) pemerintah ikut pertemuan atau sosialisasi soal bantuan modal ini lewat kantor kecamatan. Karena sessa' macai (bagus sekali) koordinasinya pemerintah daerah sama bank, bikin itu informasi tentang kemudahan modal usaha langsung dapi' (sampai) ri limanna (ke tangan) warga yang parallu ladde' (butuh sekali)".¹⁰²

Dari pihak perbankan, Bapak Suleman S. selaku *Micro Business Relationship* (MBR) BSI, menegaskan bahwa regulasi

¹⁰⁰ Makmur. Hamzah, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

¹⁰¹ Hj. Marnusi, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

¹⁰² Nur Aisyah. J, nasabah wiraswasta BSI, *wawancara pribadi*, Kecamatan Batulappa, 09 Mei 2026.

pemerintah sangat krusial dalam mempercepat penyaluran kredit mikro di lapangan:

"Kami di BSI sangat terbantu dengan adanya kuota KUR Syariah dan regulasi subsidi margin yang dikururkan pemerintah. Di tingkat lapangan, sinergi ini berjalan mulus karena aparat Kecamatan Batulappa sangat kooperatif dalam membantu validasi data nasabah, seperti pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU). Kemudahan birokrasi lokal ini memangkas waktu proses administrasi kami, sehingga penyaluran modal kepada pelaku UMKM bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel."¹⁰³

Dapat disimpulkan bahwa keberpihakan regulasi pemerintah melalui program KUR Syariah, kemudahan validasi data di tingkat kecamatan, serta sinkronisasi target pembangunan daerah dengan penyaluran modal BSI menjadi faktor pendorong yang signifikan. Kolaborasi tiga arah antara pemerintah pusat (regulasi/subsidi), pemerintah daerah (kemudahan administrasi), dan BSI (eksekutor penyaluran) terbukti efektif dalam mempermudah masyarakat Kecamatan Batulappa untuk mengakses permodalan yang murah, berkah, dan aman.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mencakup dimensi Fasilitator Permodalan (Finansial), Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM), Akselerator Digital (Teknologi), serta Layanan Sosial dan Inklusi (ZISWAF) terhadap peningkatan kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

¹⁰³ Suleman S, jabatan Micro Business Relationship (MBR) Bank Syariah Indonesia, wawancara pribadi, 07 Mei 2026.

Konsep peran perbankan syariah sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yang salah satunya dikembangkan dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam oleh tokoh seperti Umer Chapra. Menurut Chapra, pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan sejumlah elemen penting terintegrasi yang termuat dalam keempat dimensi peran tersebut. Elemen ini dianggap krusial karena keberadaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan skala usahanya. Sulit bagi UMKM di wilayah pedesaan untuk bersaing dalam pasar yang ketat tanpa adanya intervensi dari keempat elemen peran perbankan syariah tersebut.¹⁰⁴ Diskusi menyeluruh tentang dimensi-dimensi tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peran Fasilitator Permodalan (Finansial)

Fasilitator permodalan merupakan elemen utama yang menarik minat pelaku UMKM untuk bermitra dengan lembaga keuangan guna mengembangkan usahanya. Hal ini bisa berupa penyaluran pembiayaan yang syar'i, kemudahan prosedur pengajuan, serta skema bagi hasil yang kompetitif. BSI dengan berbagai keistimewaan produknya (seperti KUR Syariah) membedakan dirinya dengan lembaga keuangan konvensional maupun informal lainnya. Yang paling penting dalam pengelolaannya adalah BSI berusaha untuk memuaskan kebutuhan permodalan nasabah, terutama para pelaku UMKM yang masih merintis. Banyak pengusaha mikro saat ini yang mencari alternatif modal kerja bebas riba untuk lepas dari ketergantungan modal tidak resmi.

Memanfaatkan potensi ekonomi sektor pertanian dan industri rumah tangga di area ini, BSI berusaha memenuhi kebutuhan modal konsumen. Mayoritas nasabah datang mengajukan pembiayaan untuk digunakan

¹⁰⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 235-245.

sebagai modal kerja yang dikelola dengan aman, pembelian bahan baku, dan pengadaan alat produksi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para pelaku usaha mikro di Kecamatan Batulappa, kehadiran BSI menarik bagi mereka karena menawarkan sistem perbankan yang adil dan menenteramkan. Pelaku UMKM datang ke BSI untuk mendapatkan solusi finansial yang berkah demi menopang keberlanjutan usaha mereka.

BSI juga memberikan suasana kemitraan yang berbeda karena lebih mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan. Layanan BSI dinilai cukup rapi dan akuntabel sehingga nasabah merasa lebih nyaman di sini daripada berhadapan dengan sistem bunga atau lembaga informal yang lebih membebani. Pelaku usaha biasanya mencari ketenangan finansial dengan skema pengembalian yang fleksibel dan sesuai kemampuan usaha. Pola bagi hasil yang adil dan bebas dari unsur riba inilah yang menjadi daya tarik utama sehingga masyarakat pelaku UMKM memilih mempercayakan akses modalnya pada Bank Syariah Indonesia.

2) Peran Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM)

Sektor UMKM di Kecamatan Batulappa cukup mudah dijangkau oleh program pendampingan, namun membutuhkan perhatian khusus pada kualitas SDM. Ibukota kabupaten Pinrang memang berjarak sekitar 33 kilometer melalui jalan darat dari wilayah Batulappa, yang dapat dicapai dalam waktu sekitar 40 menit. Meskipun ada akses yang menghubungkan wilayah pedesaan ini dengan kantor cabang pembantu di ibukota kabupaten, untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat lokal membutuhkan proses edukasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan edukasi dari BSI berjalan cukup baik, namun terdapat sedikit hambatan di mana tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai manajemen keuangan modern dan akad-akad syariah (seperti *mudharabah* atau *musyarakah*) masih sangat mendasar. Karena

keterbatasan latar belakang pendidikan finansial, hal ini bisa menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil atau pemula yang belum terbiasa dengan pembukuan keuangan yang baku. Terlepas dari kenyataan bahwa produk pembiayaan BSI sangat aman dan maslahat, ada kemungkinan beberapa pelaku usaha akan ragu bermitra jika kapasitas pemahaman mereka belum ditingkatkan melalui edukasi yang intensif.

Jika aspek pendampingan dan edukasi SDM ini tidak dioptimalkan oleh pihak bank, peningkatan kapasitas ekonomi UMKM menjadi sedikit sulit. Minimnya literasi keuangan dan manajerial dapat memperpanjang masa stagnasi usaha dan menyebabkan ketidakefektifan penggunaan modal yang telah dicairkan. Hal ini dapat mengurangi motivasi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih luas, bahkan jika mereka memiliki potensi produk yang sangat kompetitif. Keterbatasan wawasan usaha juga dapat mempersulit pelaku UMKM untuk bergerak dinamis dan melihat peluang pasar yang lebih besar di luar daerah. Akibatnya, potensi peningkatan pendapatan dan keuntungan ekonomi dari sektor UMKM lokal dapat menurun secara drastis.

Pendapat masyarakat tentang kehadiran perbankan syariah juga dipengaruhi oleh intensitas pendampingan ini. Proses kemitraan yang komunikatif dan edukatif adalah hal yang dicari oleh kebanyakan pelaku usaha, dan minimnya edukasi dapat membuat program pembiayaan tampak rumit atau tidak menarik bagi mereka. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan ekonomi oleh BSI harus memprioritaskan peningkatan program pendampingan usaha guna menjamin pengalaman nasabah yang positif serta mempercepat kemandirian pelaku UMKM.

3) Peran Akselerator Digital (Teknologi)

Penambahan dan pengenalan fasilitas teknologi digital oleh BSI sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di era modern. BSI selaku lembaga keuangan telah meningkatkan dan mensosialisasikan

fasilitas pendukung transaksi digital seperti aplikasi *BSI Mobile*, layanan *QRIS*, serta agen *BSI Smart* untuk membuat ekosistem transaksi di Kecamatan Batulappa menjadi lebih ramah teknologi dan efisien bagi pelaku usaha maupun konsumen. Fasilitas transaksi digital yang baik membantu pelaku UMKM merasa lebih nyaman dan praktis dalam mengelola perputaran uang harian mereka, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional usaha.

Selain itu, pengembangan pilihan instrumen pembayaran berbasis digital ini menawarkan prospek ekonomi baru bagi penduduk sekitar, selain memberikan pengalaman transaksi yang lebih aman dan cepat tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. UMKM di Batulappa dapat memberikan pelayanan yang lebih berkkelas dan modern bagi pelanggan dengan mengadopsi teknologi digital yang disediakan BSI. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke luar daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal.

Penerapan integrasi *QRIS* dan digitalisasi keuangan pada UMKM di Batulappa saat ini sedang berlangsung secara bertahap, dengan tujuan untuk menaikkan kelas usaha mikro sehingga dapat dikenal dan bersaing lebih luas. Diharapkan proyek digitalisasi ini akan meningkatkan produktivitas usaha sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat setempat. Memastikan bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak terhambat oleh keterbatasan infrastruktur jaringan di pedesaan merupakan kendala terbesar dalam program ini. Pihak bank dan tokoh masyarakat menggarisbawahi bahwa langkah-langkah signifikan, seperti penyederhanaan fitur aplikasi yang ramah kuota dan penguatan jaringan keagenan lokal, perlu dilakukan untuk memastikan adopsi teknologi yang inklusif.

Secara garis besar, pihak pengelola dan pembina UMKM optimis dengan potensi jangka panjang dari pemanfaatan teknologi digital BSI ini. Pilihan transaksi yang lebih modern dapat membantu UMKM Kecamatan

Batulappa tumbuh menjadi pilar ekonomi yang kuat. Manajemen edukasi teknologi yang efektif dan kolaborasi dari beberapa pemangku kepentingan (seperti pemerintah daerah dan penyedia jaringan) akan menjamin bahwa upaya digitalisasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial jangka pendek tetapi juga melindungi ekosistem usaha lokal serta meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar secara berkelanjutan.

4) Peran Sosial dan Inklusi (ZISWAF)

BSI telah menerapkan sejumlah program layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok usaha yang belum memenuhi kriteria bank (*unbankable*). Kerja sama dengan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) internal maupun eksternal merupakan komponen penting dari layanan sosial dan inklusi ini. Hal ini menjamin bahwa jika terjadi kemiskinan ekstrem atau modal usaha mikro yang terancam gulung tikar di wilayah Batulappa, masyarakat dapat dengan cepat dan efektif menerima bantuan stimulan modal bergulir berbasis dana kebajikan (*Qardhul Hasan*).

Memiliki akses yang mudah ke dana sosial Islam memberikan rasa aman bagi pelaku usaha kecil, yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Untuk menjaga stabilitas kesejahteraan di kawasan pedesaan, program inklusi keuangan sosial BSI bekerja sama dengan tokoh agama dan penyuluh lapangan setempat. Keberadaan program jaring pengaman sosial ekonomi ini berfungsi untuk mencegah praktik riba/rentenir, merespons krisis ekonomi rumah tangga dengan cepat, dan memberikan perlindungan tambahan bagi kelompok masyarakat rentan. Bersama-sama, sinergi ini dapat menanggapi masalah kemiskinan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan aman.

Selain itu, memiliki program inklusi yang konsisten juga bertindak sebagai pencegah terhadap kemungkinan monopoli modal oleh segelintir pihak. Mengetahui bahwa ada dukungan sosial yang siap membantu kapan saja membuat pelaku usaha kecil merasa lebih dilindungi. Hal ini meningkatkan kenyamanan berusaha sekaligus meningkatkan persepsi BSI sebagai lembaga keuangan syariah yang menghargai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kepuasan masyarakat secara umum didorong oleh rasa aman yang meningkat ini, yang dapat menyebabkan peningkatan loyalitas nasabah dan retensi terhadap penggunaan jasa perbankan syariah.¹⁰⁵

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi UMKM dan penelitian terdahulu Nurul Azizah, yang menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi melalui lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh kelengkapan dimensi layanannya. Jika salah satu elemen baik permodalan, edukasi, teknologi, maupun instrumen sosial tidak berjalan seimbang, maka akselerasi kemandirian ekonomi pelaku UMKM di tingkat pedesaan akan terhambat.

Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang memberikan pedoman tentang bagaimana umat Islam dalam memanfaatkan apa yang ada di bumi, termasuk dalam konteks penguatan ekonomi dan pemberdayaan UMKM melalui sistem yang adil.¹⁰⁶ Adapun ayat tersebut adalah Q.S Al-Hijr (15:20):

بِرَازِقَيْنِ لَهُمَا لَسْتُكُمْ وَمَنْ مَعَايِشَ فِيهَا لَكُمْ وَعَمَرْنَا

¹⁰⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 21.

¹⁰⁶ Sukman, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Syariah Di Kota Balikpapan," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2020): hlm.63-83.

Terjemahnya:

"Dan Kami telah menyediakan di bumi itu sumber-sumber penghidupan untukmu, dan (Kami sediakan pula) makhluk-makhluk yang kamu bukan pemberi rezeki kepadanya."¹⁰⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa Allah telah menyediakan bumi sebagai tempat tinggal dengan berbagai fasilitas dan sumber penghidupan yang diperlukan manusia untuk memakmurkan kehidupan ekonomi mereka. Dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan UMKM, ayat ini menekankan pentingnya memanfaatkan dan mengelola potensi ekonomi lokal yang telah disediakan oleh Allah SWT secara bijaksana melalui wadah lembaga keuangan syariah. Potensi usaha di suatu lokasi harus diidentifikasi dan dikembangkan berdasarkan komoditas alami yang telah Allah ciptakan. Menjaga keadilan distribusi modal melalui perbankan syariah merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber ekonomi tersebut berjalan produktif dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.¹⁰⁸

Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

الْكَلَامُ مِنَ الْفَضْلِ بِهِ لَتَمْنَعُوا الْمَاءَ فَضْلًا تَمْنَعُوا لَا

Artinya:

"Janganlah kalian menahan kelebihan air untuk menghalangi tumbuhnya rumput liar (yang menjadi sumber kehidupan makhluk lain), karena Allah SWT telah memberikan manfaat kepada kita melalui hal-hal tersebut." (HR. Al-Bukhari & Muslim)¹⁰⁹

Hadis yang melarang penimbunan atau penahanan sumber daya yang bermanfaat memiliki hubungan erat dengan penerapan ke-4 dimensi peran BSI (Fasilitator Permodalan, Pendampingan, Digitalisasi, dan ZISWAF)

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 263.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 26-28.

¹⁰⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), Jilid 2, hlm. 112, No. Hadis 2353.

dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Aspek permodalan harus dijalankan tanpa menahan arus likuiditas bagi masyarakat kecil demi menghindari monopoli modal. Pendampingan harus diarahkan agar pengetahuan finansial mengalir merata sehingga tidak ada pelaku usaha yang dirugikan karena ketidaktahuan. Akselerator digital harus dirancang inklusif agar teknologi transaksi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pedesaan, sedangkan instrumen ZISWAF harus dikelola dengan efektif agar dana kebajikan tersalurkan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Integrasi prinsip-prinsip hadis ini membantu memastikan pengelolaan modal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, menjaga manfaat ekonomi bagi generasi mendatang sesuai syariat Islam.

Dalam konteks ekonomi syariah, kualitas perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh akses permodalan, kualitas SDM, teknologi, dan layanan sosial yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fasilitator finansial harus mematuhi skema yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pendampingan SDM harus mencerminkan etika Islam melalui pelayanan yang ramah, amanah, dan profesional demi meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Penerapan teknologi digital harus menjamin keamanan hak-hak nasabah, sedangkan program inklusi sosial (ZISWAF) memastikan adanya keadilan distributif bagi pelaku usaha yang kurang beruntung. Semua elemen ini harus dikelola secara harmonis untuk menciptakan ekosistem usaha yang mematuhi prinsip syariah, memanfaatkan potensi yang telah Allah berikan, dan memastikan perputaran roda ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan ke-4 dimensi peran BSI tersebut terhadap masyarakat UMKM Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dapat membawa dampak positif. Peningkatan akses modal melalui skema KUR Syariah akan mempermudah pelaku usaha dalam memperluas usahanya, sementara program pendampingan usaha dan edukasi manajerial dapat meningkatkan

kompetensi bisnis mereka. Menyediakan berbagai pilihan fasilitas digital, dari aplikasi *BSI Mobile* hingga mesin *BSI Smart*, serta pemanfaatan dana sosial ZISWAF bagi pelaku usaha mikro rentan, akan memperbaiki produktivitas usaha dan menarik minat pasar yang lebih luas. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja di tingkat kecamatan, dan mendukung penguatan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

Namun, terdapat juga potensi hambatan dan dampak negatif yang perlu diperhatikan jika tidak dimitigasi dengan baik. Peningkatan penyaluran modal tanpa diimbangi edukasi yang kuat bisa menyebabkan risiko gagal bayar (*non-performing financing*) dan beban finansial bagi pelaku UMKM. Digitalisasi yang terlalu cepat tanpa pendampingan yang merata justru dapat menciptakan ketimpangan sosial bagi pelaku usaha senior yang gagap teknologi serta memicu risiko kejahatan siber (*cybercrime*). Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada bantuan modal luar tanpa penguatan mentalitas usaha mandiri bisa membuat pelaku usaha rentan terhadap fluktuasi pasar ekonomi makro. Oleh karena itu, penting bagi Bank Syariah Indonesia untuk menerapkan strategi manajemen pendampingan yang hati-hati, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut serta memaksimalkan manfaat pemberdayaan bagi masyarakat Batulappa.¹¹⁰

2. Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Pemberdayaan ekonomi merujuk pada elemen atau faktor strategis yang membuat kelompok masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu mandiri, berkembang, dan meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup berbagai

¹¹⁰ Ahmad Fauzi dan Siti Nurjanah, “Analisis Risiko Non-Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mikro Syariah Akibat Lemahnya Literasi Keuangan Nasabah,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): hlm.145–158.

elemen yang dapat membebaskan masyarakat dari belenggu keterbatasan ekonomi, termasuk akses terhadap modal, peningkatan kapasitas internal, serta adanya proteksi usaha dari persaingan yang tidak sehat.¹¹¹ Dalam upaya peningkatan efektivitas peran Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, ada tiga kriteria utama yang harus dipertimbangkan dan dianalisis, yaitu:

a. Pemungkinan (*Enabling*)

Dalam konteks "*enabling*" (menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menawarkan stimulus awal yang sangat krusial bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa. Aspek ini diwujudkan dalam bentuk pembukaan aksesibilitas finansial yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan.

Melalui penyediaan produk pembiayaan yang berkeadilan seperti KUR Syariah, BSI membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro (seperti petani dan pengrajin gula aren) untuk keluar dari keterbatasan modal. Suasana keterbukaan informasi perbankan syariah ini berfungsi sebagai daya pendorong utama yang memikat pelaku usaha untuk menggali potensi bisnis mereka yang jarang tersentuh sebelumnya. Kemudahan akses awal ini menciptakan kesan yang kuat dan positif, sehingga meningkatkan minat masyarakat lokal untuk bangkit, berwirausaha, dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang mereka miliki.

b. Penguatan (*Empowering*)

Aspek "*empowering*" (memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata) berfokus pada peningkatan

¹¹¹ unawan dan R. A. Prasetyo, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan UMKM Berbasis Komunitas," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): hlm.45-58.

kapasitas internal pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa setelah iklim berusaha terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI tidak hanya menyediakan fasilitas dana, tetapi juga memberikan penguatan modal manajerial seperti pelatihan pembukuan keuangan syariah dasar yang sangat populer dan dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi, perlu dikembangkan berbagai aktivitas tambahan yang dapat memperkuat daya saing UMKM. Oleh karena itu, BSI juga memberikan pendampingan intensif berupa edukasi literasi keuangan digital, pengelolaan arus kas modern, serta pengenalan efisiensi teknologi transaksi. Penguatan kapasitas SDM ini bertujuan agar pelaku usaha di Batulappa tidak hanya mandiri secara modal, tetapi juga cakap secara manajerial dalam mengelola perkembangan skala bisnis mereka ke depan.

c. Perlindungan (*Protecting*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Batulappa saat ini masih memiliki kerentanan yang tinggi dalam hal stabilitas pendapatan dan perlindungan pasar dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Pelaku usaha mikro sering kali terjebak dalam skema pinjaman tidak resmi atau rentenir yang mencekik akibat keterbatasan literasi, yang bisa mengurangi daya tahan ekonomi mereka dalam menghadapi fluktuasi pasar. Keterbatasan proteksi finansial ini menunjukkan adanya peluang besar bagi BSI untuk mengintervensi melalui aspek perlindungan (*protecting*) guna mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi ekonomi lokal.

Untuk meningkatkan perlindungan destinasi ekonomi tersebut, BSI menyediakan skema pembiayaan berbasis kemitraan yang aman, transparan, dan terbebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Skema ini dirancang dengan suasana kekeluargaan yang menyatu dengan karakteristik nilai-nilai religiusitas masyarakat setempat, memungkinkan pelaku UMKM untuk

mendapatkan jaring pengaman finansial yang lebih kokoh. Dengan menyediakan sistem bagi hasil yang adil dan fleksibel saat terjadi risiko usaha, sistem perbankan syariah ini berfungsi sebagai wadah yang sempurna untuk melindungi keberlanjutan usaha dari kebangkrutan akibat guncangan ekonomi. Menu proteksi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari restrukturisasi pembiayaan yang humanis hingga penyaluran dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) bagi pelaku usaha mikro yang sedang mengalami krisis modal.¹¹²

Salah satu ayat Al-Qur'an yang relevan dengan proses tahapan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Al-Qur'an, Surah Qaf : 9

الْحَصِيدِ وَحَبِّ جَنَاتٍ بِهِ فَانْبِثْنَا مِائِدًا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَزْنِنَا

Terjemahnya:

"Dan Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam."¹¹³

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang manfaat air sebagai sumber kehidupan yang memiliki sifat memungkinkan (*enabling*) pertumbuhan, memperkuat (*empowering*) struktur tanaman, sekaligus memberikan hasil akhir yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup.¹¹⁴ Dalam konteks pemberdayaan ekonomi UMKM oleh BSI di Kecamatan Batulappa, tafsir ini mengajarkan bahwa aliran modal dan program kerja dari bank syariah (diibaratkan sebagai air yang penuh berkah) harus mampu menghidupkan sektor usaha masyarakat yang sebelumnya mati atau stagnan.

Intervensi finansial yang diberkahi dalam ayat ini menggambarkan pentingnya menjaga kebersihan sistem keuangan (bebas riba) agar dapat memberikan penguatan dan perlindungan bagi kemaslahatan ekonomi umat.

¹¹² Siti Aminah, "Peran Proteksi Finansial Bank Syariah dalam Memitigasi Risiko Eksploitasi Rentenir pada Sektor Usaha Mikro," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): hlm.189–201.

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 518.

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 215-218.

Dengan mengelola dan memanfaatkan stimulus modal perbankan secara baik, kita dapat meningkatkan kapasitas daya saing UMKM sambil memastikan bahwa ekosistem ekonomi pedesaan tetap sehat, terlindungi, dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memproduksi, dan memanfaatkan anugerah materi dari Allah SWT dengan cara yang amanah dan bertanggung jawab.

Salah satu hadis yang relevan dengan konsistensi tindakan pemberdayaan ekonomi adalah hadis dari Abu Hurairah RA (atau yang setema darinya), yang berbunyi:

فَلْيَعْرِسْهَا يَعْزِسْهَا حَتَّى تَقُومَ لَا أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ فَسِيلَةً أَحَدِكُمْ بَدَ وَفِي أَعَةِ اللَّهِ قَامَتْ إِنَّ

Artinya:

"Jika hari kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang di antara kalian ada benih (kurma), maka hendaklah ia menanamnya, walaupun ia hanya mempunyai waktu untuk menanamnya sebelum hari kiamat tiba." (HR. Ahmad & Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)¹¹⁵

Hadis ini menekankan pentingnya produktivitas, optimalisasi peluang (enabling), dan aksi nyata untuk memperkuat (empowering) ketahanan ekonomi sekecil apa pun situasinya. Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kecamatan Batulappa oleh BSI, hadis ini mengajarkan bahwa setiap usaha untuk membina usaha kecil, mengedukasi pedagang pasar, serta memberikan perlindungan modal bagi masyarakat miskin adalah bentuk amal saleh ekonomi yang harus terus diupayakan, bahkan jika tantangan geografis dan tingkat literasi masyarakat pedesaan tampak sangat menantang.

Implikasi Positif dari peningkatan pemberdayaan ekonomi UMKM melalui konsep *enabling*, *empowering*, dan *protecting* oleh BSI di Kecamatan Batulappa termasuk pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan

¹¹⁵ Al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad* (Riyadh: Dar as-Siddiq, 2000), Jilid 1, hlm. 232, No. Hadis 479.

melalui peningkatan produktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta penguatan mentalitas kemandirian bisnis. Selain itu, dengan manajemen pendampingan yang baik, pemberdayaan ini dapat mendorong pemerataan distribusi modal, membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir, serta mewujudkan stabilitas ekonomi umat yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan hukum Islam.

Implikasi Negatif (Risiko/Hambatan) mungkin meliputi dampak buruk terhadap kemandirian jika tidak dikelola dengan bijaksana, seperti munculnya ketergantungan yang berlebihan dari pelaku UMKM terhadap bantuan modal stimulus luar tanpa ada usaha untuk meningkatkan kapasitas internal secara mandiri. Selain itu, proses penguatan digitalisasi yang terlalu agresif tanpa penyaringan dapat menimbulkan kerentanan baru berupa risiko kejahatan siber (*cybercrime*) bagi nasabah pedesaan, serta potensi pengucilan ekonomi bagi pelaku usaha senior yang tidak mampu beradaptasi dengan sistem perbankan modern (*digital divide*). Oleh karena itu, penting bagi Bank Syariah Indonesia untuk mengelola proses pemungkinan, penguatan, dan perlindungan ini dengan hati-hati guna memaksimalkan maslahat jangka panjang serta meminimalkan dampak risiko negatifnya di lapangan.

3. Faktor penghambat dan faktor pendorong BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Program pemberdayaan ekonomi UMKM melalui dimensi pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*) telah diterapkan, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki banyak potensi untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang inklusif. Namun, ada beberapa aspek yang mendorong dan menghambat yang harus diperhitungkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberdayaan tersebut. Faktor-faktor ini

harus diidentifikasi dan dipahami dengan baik untuk mempertahankan tata kelola pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan yang akan terus memajukan pelaku usaha dan menawarkan dampak kesejahteraan yang nyata.¹¹⁶

Adapun faktor penghambat berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya bahwa analisis peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural dan Aksesibilitas

Dalam hal ini, adanya hambatan struktural berupa letak geografis wilayah serta keterbatasan aksesibilitas infrastruktur di Kecamatan Batulappa berdampak terhadap lambatnya penetrasi program perbankan. Akibatnya, pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan produk dan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara luas dan optimal.

Pengembangan dan pengelolaan usaha UMKM di Kecamatan Batulappa selama ini masih berjalan secara mandiri dan konvensional oleh komunitas lokal dengan keterbatasan jangkauan fisik ke kantor cabang perbankan syariah, seperti yang ditunjukkan oleh tantangan aksesibilitas geografis. Ini mencakup hal-hal seperti jarak wilayah yang cukup jauh dari pusat kota (sekitar 33 kilometer), infrastruktur jalan di beberapa pelosok desa yang masih rusak, serta keterbatasan jaringan telekomunikasi yang menghambat kelancaran transaksi digital (*BSI Mobile* atau *QRIS*). Beberapa alasan hambatan struktural ini termasuk kondisi demografis wilayah pedesaan yang menantang, alokasi infrastruktur yang belum merata, atau masalah dalam koordinasi teknis penyedia layanan teknologi.

¹¹⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menengok Kembali Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Ed. Rev., Cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 112-115.

Hambatan struktural dan aksesibilitas ini dapat berdampak luas. Di satu sisi, pelaku usaha lokal mungkin lebih mengandalkan modal swadaya yang fleksibel dalam membuat keputusan finansial yang mendesak. Namun, masalah terkait keterbatasan likuiditas modal, tidak terstandarnya pembukuan usaha, atau kurangnya regulasi keuangan yang syar'i di tingkat lokal juga dapat muncul, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Contoh hambatan struktural dan aksesibilitas dalam pemberdayaan ekonomi UMKM ini dapat dilihat dari kurangnya visibilitas layanan perbankan di area pelosok Batulappa. Jarak tempuh sekitar 40 menit menuju kantor BSI terdekat membuat pelaku usaha enggan melakukan transaksi formal, baik untuk penyetoran tunai maupun konsultasi pembiayaan. Hambatan dalam menyediakan stabilitas jaringan internet di area pedesaan juga mengurangi efektivitas program akselerator digital yang diusung oleh bank. Selain itu, tanpa adanya aksesibilitas yang memadai, upaya lokal dalam mengorganisir klaster usaha unggulan yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi juga menjadi terbatas, sehingga potensi komoditas lokal tidak teroptimalkan dengan baik.

b. Hambatan Kultural dan Rendahnya Literasi

Meskipun BSI menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sangat maslahat dan berkeadilan, hambatan kultural dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih menjadi masalah besar yang mempengaruhi efisiensi pemberdayaan ekonomi. Pola pikir masyarakat dalam mengelola keuangan belum sepenuhnya beralih ke sistem perbankan modern, meninggalkan beberapa kebiasaan lama yang kurang produktif atau tidak terencana dengan baik. Hal ini menyulitkan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan tepat sasaran, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh prinsip-prinsip transaksi tradisional yang tidak tercatat. Ketidakpahaman mengenai mekanisme akad syariah ini bisa

menjadi faktor penentu yang mengurangi minat pelaku UMKM untuk bermitra dengan BSI.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa terdapat masalah pada cara pandang kultural, di mana fasilitas modal seringkali dianggap sebagai bantuan hibah murni, bukan dana bergulir produktif yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Pengetahuan mengenai pemisahan kas pribadi dan kas usaha masih sangat terbatas. Pelaku UMKM sering kali harus menghadapi situasi di mana mereka kesulitan memenuhi persyaratan administratif perbankan, terutama saat menghadapi musim paceklik atau fluktuasi harga pasar.

Fasilitas pembukuan mandiri di tingkat pedagang kecil juga tidak banyak. Misalnya, tidak cukup pemahaman teknis untuk menangani volume transaksi harian secara akurat, terutama selama musim panen raya. Hal ini sering mengakibatkan pencampuran keuangan rumah tangga dan modal usaha yang memicu ketidaknyamanan bagi kesinambungan bisnis mereka. Selain itu, pelaku usaha juga kesulitan menemukan solusi permodalan yang aman karena area literasi keuangan yang terbatas, sehingga mereka rentan kembali terjebak dalam skema pinjaman tidak resmi (rentenir) yang lebih cepat secara prosedur namun merugikan secara ekonomi.

c. Kurangnya Pendampingan

Faktor penghambat berikutnya adalah kurangnya program pendampingan usaha yang intensif dan berkelanjutan dari pihak lembaga keuangan di wilayah Kecamatan Batulappa. Pelaksanaan sosialisasi yang hanya bersifat temporer tanpa tindak lanjut (follow-up) manajerial membuat pelaku UMKM kesulitan untuk naik kelas. Minimnya bimbingan teknis mengenai strategi pemasaran modern, inovasi kemasan produk, serta manajemen risiko usaha pasca-pencairan modal menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas pemanfaatan dana KUR Syariah. Tanpa adanya kehadiran mentor atau pendamping lapangan yang konsisten, pelaku usaha

mikro cenderung berjalan di tempat dan tidak mampu mengoptimalkan potensi bantuan finansial yang telah diterima untuk perluasan skala pasar secara jangka panjang.¹¹⁷

Hasil temuan penelitian terkait faktor penghambat pemberdayaan ekonomi UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ini didukung oleh hasil penelitian Anggita Grace Damanik dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengembangan Komponen 4A (Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary) Daya Tarik Wisata Green Owl Beach Bali.*" Jika dikontekstualisasikan ke dalam pengembangan ekonomi masyarakat, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat faktor kendala sarana prasarana serta akses jalan yang kurang memadai menjadi penghambat utama kemajuan sebuah program. Anggita Grace mengungkapkan bahwa akses menuju lokasi yang terbilang cukup melelahkan dan sulit dijangkau juga menjadi faktor penghambat masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

Kemudian, jika ditarik ke dalam analisis perbankan, keterbatasan fasilitas keagenan serta kurangnya keterlibatan pendampingan yang intensif menyulitkan pengelola lapangan maupun pelaku usaha untuk mengembangkan bahkan melengkapi elemen-elemen penguatan dan perlindungan ekonomi di objek wilayah pemberdayaan tersebut. Oleh karena itu, perbaikan aspek aksesibilitas teknis, peningkatan literasi kultural, serta penguatan pendampingan menjadi kunci utama yang harus segera dievaluasi demi meminimalkan hambatan-hambatan tersebut.

Ayat yang menjelaskan tentang konsep tersebut terdapat pada Q.S. Ali-Imran ayat 190-191:

¹¹⁷ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 159.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ
رُؤُون فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُ
بِآيَاتِ سُبْحَانَكَ فَبِئْسَ أَهْلًا لِّلْعَذَابِ النَّارِ

Terjemahnya:

*"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."*¹¹⁸

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, bahwa ayat-ayat tersebut menggambarkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Ayat ini mengajak orang-orang yang berakal (*ulul albab*) untuk merenung dan memahami bahwa semua ciptaan Allah memiliki tujuan, potensi, dan tidaklah sia-sia. Mereka yang beriman seharusnya mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik berdiri, duduk, atau berbaring, serta merenungkan ciptaan-Nya sebagai bentuk penghambaan dan permohonan perlindungan dari azab. Mereka menyebut nama Allah dalam berbagai keadaan baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Mereka juga merenungkan penciptaan alam semesta, menyadari bahwa tidak ada potensi alam yang Allah ciptakan secara sia-sia. Akibatnya, mereka berdoa kepada Allah memohon kekuatan untuk mengelola potensi tersebut secara benar dan memohon perlindungan dari azab.¹¹⁹

Ayat Surah Ali-Imran ayat 191 sangat relevan dengan pemanfaatan potensi komoditas lokal dalam program pemberdayaan ekonomi UMKM

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 75

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 286-291.

oleh BSI di Kecamatan Batulappa. Hal ini karena ayat tersebut menekankan pentingnya merenungkan, menemukenali, dan menghargai ciptaan Allah, yang mencakup kekayaan sektor riil di daerah setempat. Dalam konteks ekonomi pedesaan, ayat ini mengajarkan pelaku usaha dan perbankan untuk menyadari potensi bernilai ekonomi tinggi yang ada di sekitar mereka, seperti komoditas pertanian unggulan, hasil perkebunan, dan pengolahan gula aren. Dengan mengapresiasi dan merenungkan karunia ciptaan tersebut, masyarakat dapat lebih memahami nilai ekonomi dan produktivitas yang ada di Kecamatan Batulappa. Hal ini dapat memotivasi pihak BSI dan pengelola usaha untuk memelihara, mendanai, dan memanfaatkan kebaikan potensi ekonomi tersebut dengan bijaksana, serta menciptakan ekosistem bisnis lokal yang mandiri dan berdaya saing. Selain itu, pemahaman mendalam tentang ketiadaan kesia-siaan ciptaan Allah ini dapat memicu upaya hilirisasi produk yang menjaga keberlanjutan ekonomi, menjadikannya sebagai basis pemberdayaan yang tangguh bagi masa depan masyarakat.

Untuk memahami bagaimana mengatasi hambatan struktural, kultural, serta kurangnya pendampingan dalam penerapan konsep pemberdayaan ekonomi (Pemungkinan, Penguatan, dan Perlindungan), salah satu hadis yang relevan adalah:

لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبُّ حَتَّى أَحَدُكُمْ يُؤْمِنُ لَا

Artinya:

"Belum beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri." (HR. Al-Bukhari & Muslim)¹²⁰

Hadis ini mengajarkan prinsip empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap kebutuhan orang lain, yang dapat dihubungkan langsung dengan konsep pelayanan

¹²⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.), Jilid 1, hlm. 14, No. Hadis 13.

lembaga keuangan syariah. Upaya penanggulangan hambatan pemberdayaan, seperti menyediakan kemudahan permodalan yang adil (*enabling*), memberikan pelatihan pembukuan yang memadai (*empowering*), serta menghadirkan pendampingan lapangan untuk melindungi dari risiko kegagalan usaha (*protecting*), harus didasarkan pada prinsip mencintai dan memperhatikan kebutuhan nasabah kecil sebagaimana kita memperhatikan kenyamanan finansial diri sendiri. Ini mendorong pihak BSI sebagai fasilitator ekonomi untuk memastikan bahwa program kerja, fasilitas digital, dan jangkauan layanan yang disediakan benar-benar memenuhi harapan, kebutuhan nyata, serta standar kemaslahatan para pelaku UMKM.

Dalam konteks ekonomi dan perbankan syariah, hadis ini mengajarkan pentingnya empati dan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan finansial dan kapasitas manajerial masyarakat pedesaan. Prinsip ini mendorong pengelola perbankan syariah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dan pendampingan yang mematuhi standar syariah secara kaffah, seperti transparansi akad, kemudahan akses bagi pelaku usaha mikro rentan, serta mengedepankan etika pelayanan yang santun. Hal ini memastikan bahwa semua pelaku UMKM merasa dihargai, dibimbing, dan dibebaskan dari kesulitan ekonomi. Menerapkan prinsip empati ini dapat meningkatkan kualitas kemitraan perbankan, menguatkan jalinan kepercayaan dengan komunitas lokal, serta memberikan distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat Batulappa.

Namun, tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan mencakup potensi biaya operasional yang tinggi bagi bank untuk menjangkau pelosok desa dan kompleksitas manajerial dalam mengedukasi masyarakat yang memiliki tingkat literasi rendah. Kondisi tersebut memerlukan perhatian ekstra serta komitmen jangka panjang dari Bank Syariah Indonesia untuk memastikan bahwa semua aspek pemberdayaan berjalan selaras dengan

harapan masyarakat pelaku usaha serta nilai-nilai luhur ekonomi syariah. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat struktural, kultural, dan pendampingan ini, pengelola BSI dapat lebih fokus menyusun strategi penguatan fasilitas yang mampu mengeliminasi kendala tersebut. Perbaikan akses teknologi keagenan, peningkatan frekuensi edukasi literasi secara kekeluargaan, serta optimalisasi pendampingan usaha akan membuat ekosistem UMKM di Kecamatan Batulappa tumbuh menjadi pilar ekonomi yang kokoh, sejahtera, dan mandiri.

Berikut faktor pendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang:

a. Faktor Sinergi

BSI memiliki instrumen kemitraan yang kuat melalui jalinan kerja sama kelembagaan, menjadikannya lembaga yang ideal untuk membangun kolaborasi strategis dalam menggerakkan sektor riil. Terdapat ekosistem rantai pasok lokal yang luas antara petani, pengrajin gula aren, dan pedagang pasar di Kecamatan Batulappa, yang membutuhkan jembatan finansial. Sinergi ini memberikan keteduhan di samping kepastian modal bagi para pelaku usaha, yang membuat program intervensi perbankan syariah ini berjalan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Daya dorong utama bagi keberhasilan pemberdayaan di lokasi ini adalah kuatnya kemitraan antar pemangku kepentingan.

Kesadaran akan potensi ekonomi lokal yang luar biasa ini mendorong dioptimalkannya penyaluran program inklusi keuangan dari BSI. Pihak bank bersama dinas terkait di daerah tersebut melihat potensi UMKM untuk tumbuh melalui penyediaan akses pembiayaan yang asli, produktif, dan menyegarkan roda usaha. Tujuan untuk menyebarkan kemandirian ekonomi dan memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk menikmati fasilitas perbankan syariah mengarah pada keputusan untuk

memperluas jangkauan keagenan dan produk KUR Syariah kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, BSI berdedikasi untuk mempertahankan komitmen keadilan dan standar keberlanjutan usaha yang berjalan saat ini.

Secara keseluruhan, integrasi dan kualitas hubungan kemitraan dengan BSI, didukung oleh fasilitas modal yang memadai dan kerja sama yang baik dengan perangkat desa, membuatnya menjadi pendorong ekonomi yang unggul. Komitmen untuk menjaga keadilan distribusi modal dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan rantai pasok pariwisata maupun komoditas unggulan memastikan bahwa UMKM di Batulappa dapat terus berkembang sebagai sektor yang kuat, aman, dan nyaman bagi pelaku usaha. Dengan demikian, BSI tidak hanya memfasilitasi pelaku UMKM dengan bantuan finansial tetapi juga memberikan pengalaman berusaha yang terarah dan berkelanjutan.

b. Faktor Sosiokultural

Sebagai taktik utama untuk mempromosikan penerapan konsep pemberdayaan ekonomi yang adil, administrasi BSI memanfaatkan kedekatan nilai-nilai sosial keagamaan dan budaya masyarakat lokal. Masyarakat Kecamatan Batulappa dikenal memegang teguh prinsip-prinsip religiusitas Islam dan semangat gotong royong tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pemanfaatan aspek sosiokultural ini adalah untuk menjadikan produk perbankan syariah sebagai solusi finansial yang lebih memikat dan diterima tanpa resistensi.

Lembaga keuangan ini memfasilitasi penyerapan pembiayaan yang khas melalui sosialisasi akad-akad syariah yang terintegrasi dengan nilai-nilai kejujuran (*amanah*) dan keadilan (*'isw*). Pengalaman berusaha masyarakat akan semakin bertambah ketika mereka dapat menjalankan roda ekonomi sekaligus memelihara kedalaman nilai budaya religius. Keberhasilan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Batulappa didukung sebagian besar oleh pertimbangan sosiokultural ini. Pihak bank dapat

memberikan dampak pemberdayaan yang lebih kuat dan bertahan lama kepada para pelaku usaha dengan memadukan bagian dari karakteristik budaya lokal yang menjauhi praktik riba ke dalam edukasi literasi keuangan mereka.

Pihak bank memastikan bahwa pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan sosialisasi literasi syariah untuk memfasilitasi kehadiran masyarakat di acara-acara edukasi tersebut. Untuk mendukung adaptasi sosial ini, fasilitas kemudahan transaksi jarak jauh seperti Agen *BSI Smart* dan ruang konsultasi usaha ditawarkan di pusat aktivitas warga. Hal ini menjamin bahwa pelaku UMKM akan senang dengan pelayanan yang ada dan dapat menjalankan usaha mereka dengan tenang. Masyarakat dapat menikmati ekosistem usaha yang lebih lengkap dan terinformasi dengan bantuan layanan sosial perbankan syariah seperti penyaluran dana kebajikan (*Qardhul Hasan*), pendampingan, dan jaminan keamanan transaksi.

c. Faktor Keberpihakan Regulasi

Ketersediaan landasan hukum dan kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada sektor ekonomi kerakyatan menjadi pendorong utama yang mempercepat gerak pemandu lapangan dan akuntan BSI di Kecamatan Batulappa. Regulasi yang akrab dengan sektor UMKM ini menawarkan detail tentang alokasi dana khusus, seperti pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, penurunan tarif margin yang rendah, dan penyederhanaan syarat administrasi yang khas bagi pengusaha mikro pedesaan. Dengan pemahaman regulasi yang baik ini, para staf BSI dapat memberikan skema pelayanan yang lebih personal dan tepat sasaran bagi nasabah, sehingga meningkatkan efektivitas penyerapan modal usaha.

Adanya regulasi pemerintah daerah maupun pusat yang mendorong gerakan literasi keuangan inklusif memberikan petunjuk yang jelas dan bermanfaat bagi pihak perbankan mengenai cara menjangkau klaster usaha

di pelosok desa. Kebijakan tersebut juga memberikan saran untuk aksesibilitas modal yang lebih baik, membuat pelaku UMKM lebih mudah dan nyaman untuk bermitra dengan BSI, sehingga meningkatkan jumlah masyarakat yang terbebas dari jeratan rentenir keuangan informal.¹²¹

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan penelitian dari Anggita Grace Damanik dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengembangan Komponen 4A (Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary) Daya Tarik Wisata Green Owl Beach Bali.*" Meskipun berfokus pada sektor pariwisata, jika dikontekstualisasikan ke dalam pengembangan ekonomi daerah, Damanik mengidentifikasi bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada tiga faktor pendorong utama yang saling bertautan: faktor alam potensi lokal (sinergi ekosistem), budaya masyarakat (sosiokultural), serta kualitas pengelolaan regulasi dan sumber daya manusia (keberpihakan regulasi). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keaslian potensi lokal, adaptasi kegiatan budaya setempat, serta kualitas tata kelola manajemen adalah elemen-elemen krusial dalam meningkatkan daya tarik dan keberhasilan program.

Dalam konteks penelitian ini, faktor alam dikonversikan sebagai faktor sinergi potensi lokal yang mencakup kekayaan ekosistem pertanian dan keunikan produk komoditas unggulan yang dapat menarik perhatian pasar luas. Misalnya, wilayah Batulappa yang memiliki panorama agraria menakjubkan dan kondisi komoditas alam yang mendukung kegiatan produksi riil dapat meningkatkan ketertarikan investor dan lembaga keuangan. Selain itu, faktor budaya dikonversikan menjadi faktor sosiokultural yang melibatkan penonjolan aspek-aspek lokal seperti tradisi syariah, religiusitas, dan kejujuran usaha yang memberi nilai tambah pada

¹²¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Ed. Rev., Cet. 7 (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 74-79.

etos kerja. Budaya lokal yang kaya dan terpelihara dengan baik dapat memberikan karakteristik usaha yang autentik dan memikat bagi ekosistem perbankan syariah.

Terakhir, faktor sumber daya manusia dikonversikan menjadi faktor keberpihakan regulasi yang mencakup kualitas implementasi kebijakan yang dijalankan oleh staf perbankan dan pengelola regulasi ekonomi. Pelayanan yang didukung regulasi yang ramah, berpengetahuan, dan efisien dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan memastikan pengalaman kemitraan yang menyenangkan selama proses pemberdayaan berjalan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menekankan pentingnya memperhatikan ketiga faktor pendorong tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dengan memperbaiki aspek-aspek sinergi, sosiokultural, dan keberpihakan regulasi, BSI dapat memastikan bahwa destinasi ekonomi masyarakat tidak hanya berkembang secara finansial tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan yang menyeluruh dan memuaskan bagi para pelaku usaha kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BSI dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang telah menjalankan peran strategisnya secara komprehensif melalui empat dimensi utama.

- a. Sebagai Fasilitator Permodalan (Finansial): BSI hadir menyediakan produk pembiayaan seperti KUR Syariah yang berkeadilan, terbebas dari praktik riba, dan memiliki skema margin yang fleksibel bagi pelaku usaha.
- b. Sebagai Pendamping dan Edukasi (Kapasitas SDM): BSI memberikan bimbingan mengenai literasi keuangan syariah dasar dan pelatihan pembukuan sederhana untuk meningkatkan profesionalisme manajemen usaha nasabah.
- c. Sebagai Akselerator Digital (Teknologi): BSI memfasilitasi modernisasi transaksi UMKM melalui pengenalan fitur *mobile banking* (BSI Mobile) dan instrumen pembayaran digital seperti QRIS.
- d. Sebagai Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf): BSI menyalurkan bantuan modal bergulir berbasis dana kebajikan bagi pelaku UMKM di lapisan paling bawah yang belum memenuhi kriteria komersial perbankan (*unbankable*). Keseluruhan peran tersebut secara nyata mengimplementasikan tahap pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*) bagi ekosistem ekonomi pedesaan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam menjalankan pemberdayaan tersebut, BSI dihadapkan pada beberapa faktor pendorong dan penghambat di lapangan:

- a. Faktor Pendorong: Implementasi program didukung kuat oleh faktor sinergi yang harmonis antara bank, aparaturnya pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Selain itu, faktor sosiokultural masyarakat yang religius dan anti-riba sangat sejalan dengan konsep perbankan syariah. Terakhir, faktor keberpihakan regulasi seperti subsidi margin dari pemerintah untuk KUR Syariah dan kemudahan administrasi di tingkat lokal mempercepat penyerapan modal.
- b. Faktor Penghambat: BSI masih menghadapi hambatan struktural dan aksesibilitas berupa jarak tempuh yang jauh (± 33 km dari pusat kota), akses jalan pedalaman yang berbatu, serta terbatasnya jaringan sinyal internet (*blank spot*) yang melumpuhkan transaksi digital. Terdapat pula hambatan kultural dan rendahnya literasi di mana masyarakat masih takut dengan birokrasi, terbiasa dengan pembukuan "ingat-ingatan", serta sulit memahami istilah teknis akad syariah. Kendala terakhir adalah kurangnya frekuensi pendampingan (*monitoring*) secara rutin akibat keterbatasan personel lapangan, sehingga edukasi belum sepenuhnya terserap optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi UMKM di masa mendatang:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pinrang
 - Peningkatan Intensitas *Monitoring*: Disarankan untuk menyusun jadwal pendampingan lapangan yang lebih rutin guna memastikan modal yang disalurkan benar-benar berputar secara produktif, serta mencegah nasabah kembali pada pola manajemen keuangan yang buruk.

- Penyederhanaan Komunikasi Edukasi: Diharapkan pihak *Account Officer* atau MBR dapat menggunakan bahasa daerah atau analogi sehari-hari yang lebih sederhana saat menjelaskan istilah akad syariah, agar nasabah lanjut usia tidak merasa canggung atau kebingungan.
 - Perluasan Jangkauan Fisik (Agen BSI Smart): Untuk menyiasati hambatan jarak, BSI perlu memperbanyak titik agen Laku Pandai (BSI Smart) di pelosok Kecamatan Batulappa agar nasabah tidak perlu menempuh jarak jauh untuk transaksi mendasar.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Pinrang & Kecamatan Batulappa)
- Perbaikan Infrastruktur Fisik: Pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan perbaikan dan pengaspalan ruas-ruas jalan di area pedalaman Batulappa demi menunjang kelancaran mobilitas ekonomi dan distribusi hasil bumi.
 - Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi: Bekerja sama dengan penyedia layanan jaringan untuk membangun *tower* pemancar sinyal (BTS) di titik-titik *blank spot*, sehingga program digitalisasi UMKM perdesaan bisa berjalan efektif.
3. Bagi Pelaku UMKM Kecamatan Batulappa
- Peningkatan Disiplin Manajemen: Pelaku UMKM didorong untuk mulai mengubah kebiasaan lama dengan secara disiplin memisahkan keuangan rumah tangga dari modal jualan melalui pembukuan sederhana.
 - Keterbukaan terhadap Inovasi: Masyarakat diharapkan lebih proaktif mengikuti pelatihan yang diadakan oleh bank atau pemerintah, serta tidak takut untuk mulai mengadopsi teknologi pembayaran digital demi perluasan jangkauan pasar.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas fokus kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya mengukur seberapa besar

persentase peningkatan laba bersih UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BSI. Hal ini akan melengkapi temuan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dengan angka statistik yang terukur.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, dan Siti Nurjanah. 2021. "Analisis Risiko Non-Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mikro Syariah Akibat Lemahnya Literasi Keuangan Nasabah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (2).
- Akmal, Andi Muhammad. "Potensi Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Gula Aren di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Etika Bisnis Syariah: Implementasi dalam Perbankan Syariah dan Pemberdayaan UMKM*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Merger Bank Syariah: Strategi Penguatan Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arisanti, Risna. (Nasabah Wiraswasta BSI). 2026. *Wawancara Pribadi*. Kecamatan Batulappa: 09 Mei 2026.
- Ascarya. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Azizah, Nurul. "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Ciputat)." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. *Kecamatan Batulappa Dalam Angka 2024*. Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2024.
- Bakti, Syarifuddin. "Transformasi Ekonomi Pedesaan: Studi Sosiologi Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten Pinrang." *Jurnal Sosio-Ekonomi Rural* 8, no. 2 (2022).
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Buchori, Nur S. *Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Komoditas Lokal dan Digitalisasi UMKM*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2024.

- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pinrang. *Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang*. Pinrang: Dinas Koperasi dan UMKM, 2023.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang. 2025. *Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pinrang Tahun 2025*. Pinrang: Dinas Koperasi dan UKM.
- Ertiyant, Wulanda Fuan dan Fitri Nur Latifah. "Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).
- Fanani, Ahmad Fuad. *Inklusi Keuangan Syariah dan Relaksasi Kebijakan bagi UMKM di Sektor Agrikultur*. Malang: Inteligencia Media, 2024.
- Fauzi, M. *Evaluasi Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Perbankan Syariah di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Gunawan dan R. A. Prasetyo, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan UMKM Berbasis Komunitas," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 45-58
- Hamidi, Luthfi dan Muhammad Ridhwan Achmad. *Literasi Keuangan Syariah dan Strategi Pemberdayaan UMKM di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Hamidi, M. Luthfi. *Islamic Social Finance: Literasi, Inklusi, dan Pendampingan UMKM di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hamzah, Makmur. (Nasabah Wiraswasta BSI). 2026. *Wawancara Pribadi*. Kecamatan Batulappa: 09 Mei 2026.
- Husainy, Kemas Erwan. "Tancap Gas awal 2026, BSI Salurkan Rp1,65 Triliun KUR Syariah." *News Update Bank Syariah Indonesia*, 21 April 2026.
- J, Nur Aisyah. (Nasabah Wiraswasta BSI). 2026. *Wawancara Pribadi*. Kecamatan Batulappa: 09 Mei 2026.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Khabibah, Siti Maria Ulfa. "Struktur Modal pada UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan Gang IV Kota Kediri." Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2020
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia*. Jakarta: KNEKS, 2019.
- Mamuaya, Nova Christian, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Padang: Azzia Karya Bersama, 2025.
- Mardikanto, T. dan P. Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Marnusi, Hj. (Nasabah Wiraswasta BSI). 2026. *Wawancara Pribadi*. Kecamatan Batulappa: 09 Mei 2026.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 215-218.
- Nurhasanah, S. dan H. Wijaya. "Peran Bank Syariah Indonesia dalam Transformasi UMKM di Era Digital: Studi Kasus Sulawesi Selatan." *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2023).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Pratama, A. "Analisis Strategi Pendampingan dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Ketahanan UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021).
- Pratama, I. G. S. *Analisis Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia: Transformasi Digital dan Ketahanan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2024.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Laporan Keberlanjutan 2025: Di Era Baru Bank Emas*. Jakarta: BSI, 2025.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Pinrang. 2025. "Profil Pembiayaan dan Data Penerima Manfaat Kontrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." Dokumentasi Internal BSI KC Pinrang.

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 2025. *Laporan Tahunan 2025: Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Rahmadani F., Puja. "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Sari, R. K. *Metode Observasi dalam Penilaian Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Akademik, 2022.
- Setiawati, Nur, dkk. *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholikin, Ahmad. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 1 (2025).
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menengok Kembali Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Ed. Rev. Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Sukman. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Syariah Di Kota Balikpapan." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2020): 63-83.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- S, Suleman. (Micro Business Relationship Bank Syariah Indonesia). 2026. *Wawancara Pribadi*. Kecamatan Batulappa: 07 Mei 2026.
- Tambunan, T. T. H. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Wawancara dengan Ibu Daling dan Bapak Syarif (Pelaku UMKM di Kecamatan Batulappa). Kabupaten Pinrang, 10 Februari 2026.

Zulkifli, M. "Inklusi Keuangan Syariah bagi Masyarakat Pesisir dan Pedagang Kecil." *Jurnal Ekonomi Modern* 10, no. 1 (2025).

Ahmad Fauzi, dan Siti Nurjanah. 2021. "Analisis Risiko Non-Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mikro Syariah Akibat Lemahnya Literasi Keuangan Nasabah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (2): 145–158.





	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FEBI Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p align="center">INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

MAHASISWA : NURKHAFIFAH ANUGRAH
 NIM : 2220203862201016
 FAKULTAS : FEBI
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
 DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMKM PADA
 MASYARAKAT KECAMATAN BATULAPPA
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi informan dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang” seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Wawancara Untuk Pihak Micro Business Representative (MBR) Bank Syariah Indonesia (BSI)

- 1. Bagaimana peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?**

a. Peran Fasilitator Permodalan (Finansial) :

1. Apa saja skema pembiayaan syariah yang paling diminati oleh pelaku UMKM di Batulappa, dan bagaimana BSI memastikan persyaratan tersebut tidak memberatkan pelaku usaha kecil di wilayah perdesaan?
2. Sejauh mana fleksibilitas sistem bagi hasil atau margin dalam produk BSI mampu membantu keberlanjutan arus kas (*cash flow*) UMKM yang memiliki siklus pendapatan musiman?

b. Peran Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM) :

1. Bagaimana bentuk konkret pendampingan yang diberikan BSI kepada UMKM di Batulappa, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar perbankan?
2. Seberapa efektif program literasi keuangan syariah yang dijalankan BSI dalam mengubah pola pikir pelaku UMKM dari sekadar mencari modal menjadi pengelolaan usaha yang profesional dan syar'i?

c. Peran Akselerator Digital (Teknologi) :

1. Apa saja kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan instrumen digital seperti QRIS atau BSI Mobile di kalangan pedagang dan pelaku usaha di Kecamatan Batulappa?
2. Bagaimana digitalisasi layanan perbankan BSI membantu memperluas akses pasar UMKM lokal hingga ke luar wilayah Kabupaten Pinrang?

d. Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf) :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) dikelola agar tepat sasaran bagi UMKM kategori *asnaf* yang belum memiliki akses ke pembiayaan komersial?
2. Sejauh mana integrasi antara program bantuan sosial (Ziswaf) dengan pembinaan kewirausahaan mampu menaikkan kelas (*upgrading*) pelaku usaha mikro dari penerima bantuan menjadi entitas yang mandiri secara ekonomi?

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

a. Faktor Penghambat :

- **Hambatan Struktural dan Aksesibilitas**

1. Bagaimana BSI memetakan aksesibilitas masyarakat di Kecamatan Batulappa, mengingat lokasi geografisnya yang mungkin memiliki tantangan tersendiri dibandingkan wilayah pusat kota Pinrang?
2. Sejauh mana infrastruktur perbankan digital (seperti BYOND atau agen BSI Smart) dapat menjangkau pelaku UMKM di Batulappa yang mungkin memiliki keterbatasan sinyal atau perangkat?
3. Apakah ada kebijakan khusus atau skema penjaminan yang lebih fleksibel bagi pelaku UMKM di daerah pelosok yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi atau agunan konvensional?

- **Hambatan Kultural dan Rendahnya Literasi**

1. Tantangan apa yang paling sering dihadapi petugas lapangan saat mensosialisasikan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat yang mungkin masih terbiasa dengan sistem keuangan tradisional atau non-formal?
2. Sejauh mana tingkat pemahaman (literasi) masyarakat Batulappa mengenai perbedaan akad syariah (seperti Murabahah atau Mudharabah) mempengaruhi minat mereka dalam mengakses pembiayaan di BSI?
3. Bagaimana BSI mengatasi resistensi kultural atau stigma tertentu di masyarakat pedesaan terkait prosedur perbankan yang dianggap rumit?

- **Kurangnya Pendampingan yang Berkelanjutan (Monitoring)**

1. Bagaimana mekanisme pemantauan (monitoring) yang dilakukan BSI terhadap penggunaan dana pembiayaan oleh UMKM di Batulappa agar tetap produktif dan sesuai akad?
2. Apa saja kendala utama yang menyebabkan program pendampingan usaha belum bisa dilakukan secara intensif atau terjadwal bagi seluruh nasabah UMKM di wilayah tersebut?
3. Apakah BSI memiliki program *capacity building* (pelatihan manajemen usaha) khusus untuk nasabah di Batulappa, dan bagaimana pihak bank mengukur keberhasilan dari pendampingan tersebut?

b. Faktor Pendorong :

- **Faktor Sinergi**

1. Sejauh mana efektivitas kerja sama yang telah terjalin antara BSI dengan komunitas atau kelompok usaha lokal di Batulappa dalam mempercepat penyaluran pembiayaan?
2. Apakah ada skema kemitraan khusus dengan pihak swasta atau distributor besar di wilayah Pinrang yang membantu BSI dalam memitigasi risiko pembiayaan pada pelaku UMKM?
3. Bagaimana BSI mengintegrasikan program pemberdayaannya dengan pendampingan teknis yang mungkin sudah dilakukan oleh lembaga lain (seperti dinas terkait atau organisasi masyarakat)?

- **Faktor Sosiokultural**

1. Mengingat masyarakat Batulappa memiliki nilai-nilai religius yang kuat, sejauh mana label "Syariah" menjadi daya tarik utama (Unique Selling Point) yang memudahkan BSI masuk ke lapisan masyarakat terdalam?
2. Bagaimana BSI memanfaatkan kearifan lokal atau modal sosial (seperti sistem kekerabatan atau kepercayaan antarwarga) di

Batulappa untuk memastikan tingkat pengembalian pembiayaan yang tetap sehat?

3. Apakah ada pendekatan komunikasi khusus berbasis budaya lokal yang digunakan petugas lapangan BSI untuk membangun kepercayaan (*trust*) dengan para pelaku UMKM pedesaan?

- **Faktor Keberpihakan Regulasi Pemerintah**

1. Bagaimana dampak konkret dari kebijakan pemerintah terkait subsidi margin (seperti KUR Syariah) terhadap peningkatan kuota pembiayaan UMKM di wilayah Kecamatan Batulappa?
2. Apakah ada dukungan regulasi dari Pemerintah Daerah Pinrang atau Pemerintah Kecamatan yang secara spesifik mempermudah BSI dalam melakukan sosialisasi atau validasi data calon nasabah?
3. Sejauh mana sinkronisasi antara target pembangunan ekonomi daerah dari pemerintah dengan program prioritas penyaluran modal dari BSI di sektor-sektor unggulan Batulappa?

B. Pengantar Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi informan dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang” seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Wawancara Untuk Pelaku UMKM yang menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di KC Pinrang (Masyarakat Kecamatan Batulappa)

1. Bagaimana peran BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

a. Peran Fasilitator Permodalan (Finansial) :

1. Dari sekian banyak pilihan pinjaman di BSI, jenis mana yang paling banyak disukai atau diambil oleh bapak/ibu dan teman-teman pedagang di Batulappa ini? (Misal: sistem beli barang dibayarin bank dulu, atau sistem bagi hasil untung-rugi?)
2. Menurut bapak/ibu, apakah syarat-syarat yang diminta BSI (seperti surat-surat dari desa atau jaminan) sudah cukup mudah? Ada tidak syarat yang menurut bapak/ibu masih terasa berat buat pedagang kecil di desa?
3. Usaha di desa kan sering ada musimnya (kadang ramai, kadang sepi). Nah, apakah aturan bagi hasil atau keuntungan di BSI bisa menyesuaikan kalau dagangan bapak/ibu lagi sepi? Jadi nggak sampai bikin uang modal usaha bapak/ibu habis cuma buat bayar cicilan?
4. Apakah bapak/ibu merasa sistem di BSI ini membantu ‘uang putar’ usaha tetap aman? Misalnya, ada tidak kelonggaran atau cara bayar khusus kalau pas lagi belum musim panen atau belum ramai pembeli?

b. Peran Pendampingan dan Edukasi (Kapasitas SDM) :

1. Pernah tidak orang dari BSI datang langsung untuk mengajari bapak/ibu cara mencatat uang masuk dan uang keluar supaya tidak campur dengan uang dapur?
2. Selama jadi nasabah, apakah bapak/ibu dibantu atau diberi contoh cara membuat pembukuan (catatan harian) yang benar supaya kalau mau tambah modal lagi nanti jadi lebih mudah?
3. Apakah petugas bank pernah memberikan buku panduan atau mengajari cara pakai aplikasi di HP untuk mencatat hasil jualan bapak/ibu?

4. Setelah berhubungan dengan BSI, apakah bapak/ibu jadi merasa lebih paham cara mengatur uang usaha yang lebih rapi (profesional)? Atau masih sama saja seperti dulu?
5. Apakah bapak/ibu sekarang jadi lebih memperhatikan keberkahan dalam berjualan, misalnya jadi lebih teliti soal timbangan atau kejujuran dalam berdagang sesuai prinsip syariah setelah mengobrol dengan orang bank?
6. Dulu kan mungkin bapak/ibu ke bank cuma buat cari modal saja, nah sekarang setelah sering mengobrol dengan orang BSI, apakah bapak/ibu jadi punya rencana untuk membesarkan usaha supaya lebih maju?
7. Apa saran atau ilmu yang paling bapak/ibu ingat dari petugas BSI yang membantu bapak/ibu merasa lebih tenang dan yakin dalam menjalankan usaha secara islami?

c. Peran Akselerator Digital (Teknologi) :

1. Bapak/ibu sudah pernah coba pakai QRIS (barcode untuk bayar) atau aplikasi BYOND dari BSI? Misalnya sinyal susah, aplikasinya bingung makainya, atau pelanggan disini masih lebih suka bayar pakai uang tunai?
2. Menurut bapak/ibu, apa yang bikin pedagang di Kecamatan Batulappa ini masih ragu atau malas pakai pembayaran digital? Apakah karena takut salah pencet atau karena belum paham cara narik uangnya ke tunai?
3. Pernah tidak petugas BSI datang ke sini khusus buat ngajarin cara pakai aplikasi itu sampai bapak/ibu benar-benar bisa?
4. Semenjak pakai layanan digital atau jadi nasabah BSI, apakah bapak/ibu jadi lebih gampang terima pesanan dari luar daerah (misal dari Makassar atau luar Sulawesi) karena urusan kirim uang jadi lebih mudah?

5. Apakah dengan adanya aplikasi dari BSI, bapak/ibu merasa lebih percaya diri buat promosi jualan di media sosial (WA/FB) karena transaksi pembayarannya sudah bisa lewat bank dan lebih aman?
6. Pernah tidak bapak/ibu dapat bantuan atau saran dari BSI tentang cara jualan online supaya pembelinya bukan cuma orang Batulappa atau Pinrang saja?

d. Peran Sosial dan Inklusi (Ziswaf) :

1. Sebelum bapak/ibu dapat modal dari BSI, apakah pernah dapat bantuan modal yang sifatnya cuma-cuma (tidak perlu dikembalikan) dari dana zakat atau sedekah yang dikelola BSI?
2. Menurut sepengetahuan bapak/ibu, apakah bantuan zakat dari bank itu sudah diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan atau yang usahanya memang baru merintis di Kecamatan Batulappa?
3. Apakah proses untuk mendapatkan bantuan dana zakat/sedekah tersebut mudah syaratnya bagi pedagang kecil seperti bapak/ibu yang belum punya agunan (jaminan)?
4. Setelah dapat bantuan dana zakat/sedekah kemarin, apakah pihak BSI juga kasih pelatihan atau bimbingan cara jualan supaya usahanya makin gede?
5. Apakah bapak/ibu merasa bantuan dari BSI itu bikin usaha bapak/ibu 'naik kelas'? Misalnya, dari yang dulu cuma dibantu zakat, sekarang sudah mampu buat ambil pinjaman modal sendiri karena usahanya makin lancar?
6. Setelah dibina oleh BSI, apakah bapak/ibu sekarang sudah merasa lebih mandiri dalam mengatur uang dan mengembangkan usaha tanpa harus bergantung terus pada bantuan cuma-cuma?

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong BSI dalam pemberdayaan ekonomi UMKM pada masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

a. Faktor Penghambat:

- **Hambatan Struktural dan Aksesibilitas**

1. Menurut bapak/ibu, apakah lokasi kantor BSI atau layanan banknya sudah cukup dekat dan mudah di datangi dari sini? Atau bapak/ibu merasa jaraknya masih terlalu jauh untuk urusan setor atau pinjam modal?
2. Apakah bapak/ibu pernah pakai aplikasi BSI di HP atau lewat agen BSI Smart terdekat? Kalau pernah, apakah sinyal atau jenis HP yang dipakai sering jadi kendala buat bapak/ibu saat mau transaksi?
3. Waktu mau mengajukan bantuan modal, apakah bapak/ibu merasa syarat surat-menyuratnya ribet? Terus, bagaimana menurut bapak/ibu soal syarat jaminan (agunan) yang diminta, apakah memberatkan atau sudah pas buat usaha kecil di desa?

- **Hambatan Kultural dan Rendahnya Literasi**

1. Sebelumnya, apakah bapak/ibu sudah paham perbedaan pinjaman ke orang/koperasi? Apakah penjelasan dari petugas BSI mudah dipahami atau malah bikin bingung?
2. Apakah bapak/ibu tahu bedanya sistem bagi hasil dan sistem jual beli di BSI? Apakah istilah-istilah seperti Murabahah atau Mudharabah itu terdengar asing atau bapak/ibu sudah mengerti maksudnya?
3. Ada tidak rasa takut atau ragu dari bapak/ibu atau tetangga disini kalau mau berurusan dengan bank karena dianggap 'ribet' atau

‘banyak bunganya’? Menurut bapak/ibu, apa yang bikin warga di Kecamatan Batulappa masih sungkan buat pakai bank?

- **Kurangnya Pendampingan yang Berkelanjutan (Monitoring)**

1. Setelah bapak/ibu menerima modal dari BSI, apakah petugas bank sering datang mengecek bagaimana uang tersebut dipakai untuk usaha? Apakah mereka memastikan uangnya benar-benar dipakai untuk modal jualan dan bukan untuk keperluan lain?
2. Menurut bapak/ibu, apakah petugas BSI sudah cukup sering memberikan arahan atau bimbingan usaha? Kalau jarang, menurut bapak/ibu apa yang membuat petugas bank susah untuk datang mendampingi pedagang di sini secara rutin?
3. Pernahkah bapak/ibu diajak ikut pelatihan khusus, misalnya belajar cara mengatur keuangan atau cara mengembangkan bisnis dari BSI? Setelah ikut kegiatan itu, apakah bapak/ibu merasa ada kemajuan nyata pada usaha yang dijalankan?

b. Faktor Pendorong:

- **Faktor Sinergi**

1. Apakah bapak/ibu merasa lebih mudah mendapatkan modal dari BSI karena bapak/ibu tergabung dalam kelompok tani atau komunitas pedagang di Batulappa? Menurut bapak/ibu, apakah kelompok tersebut membantu mempercepat proses pengajuan ke bank?
2. Apakah bapak/ibu diajak bekerja sama dengan perusahaan besar atau distributor di Pinrang oleh pihak BSI? Misalnya, apakah bank membantu menjamin kelancaran stok barang atau membantu mencari pembeli supaya usaha bapak/ibu lebih aman?
3. Selain dari BSI, apakah bapak/ibu juga pernah dapat bantuan dari Dinas Koperasi atau organisasi lain? Jika iya, apakah bantuan dari

BSI itu nyambung atau sejalan dengan arahan yang bapak/ibu dapatkan dari lembaga-lembaga tersebut?

- **Faktor Sosiokultural**

1. Apakah alasan utama bapak/ibu memilih BSI karena ada label ‘Syariah’ nya yang bikin hati lebih berkah? Menurut bapak/ibu , seberapa penting sistem yang bebas riba bagi warga di Batulappa?
2. Di sini kan rasa kekeluargaannya masih kuat, apakah pihak bank sering minta bantuan tokoh masyarakat atau ketua kelompok kalau ada urusan soal modal usaha? Apakah rasa saling percaya antar tetangga di sini bikin bapak/ibu jadi lebih semangat untuk disiplin membayar setoran?
3. Bagaimana cara petugas BSI ngobrol sama bapak/ibu? Apakah mereka memakai bahasa atau cara-cara sopan santun khas orang sini yang bikin bapak/ibu merasa nyaman dan percaya sama mereka?

- **Faktor Keberpihakan Regulasi Pemerintah**

1. Apakah bapak/ibu merasa adanya program KUR Syariah dari pemerintah membuat lebih banyak pedagang di Batulappa ini jadi bisa mendapatkan tambahan modal usaha dengan biaya yang lebih murah?
2. Waktu bapak/ibu mau mengurus modal ke BSI, apakah pihak kelurahan atau kecamatan di sini ikut membantu mempermudah urusan surat-menyurat atau berkasnya? Apakah mereka juga sering mengajak bapak/ibu untuk ikut pertemuan soal bantuan modal ini?
3. Menurut bapak/ibu, apakah bantuan modal dari BSI ini sudah menyasar usaha-usaha yang paling utama di Batulappa (seperti petani atau pedagang hasil bumi)? Apakah program dari bank ini

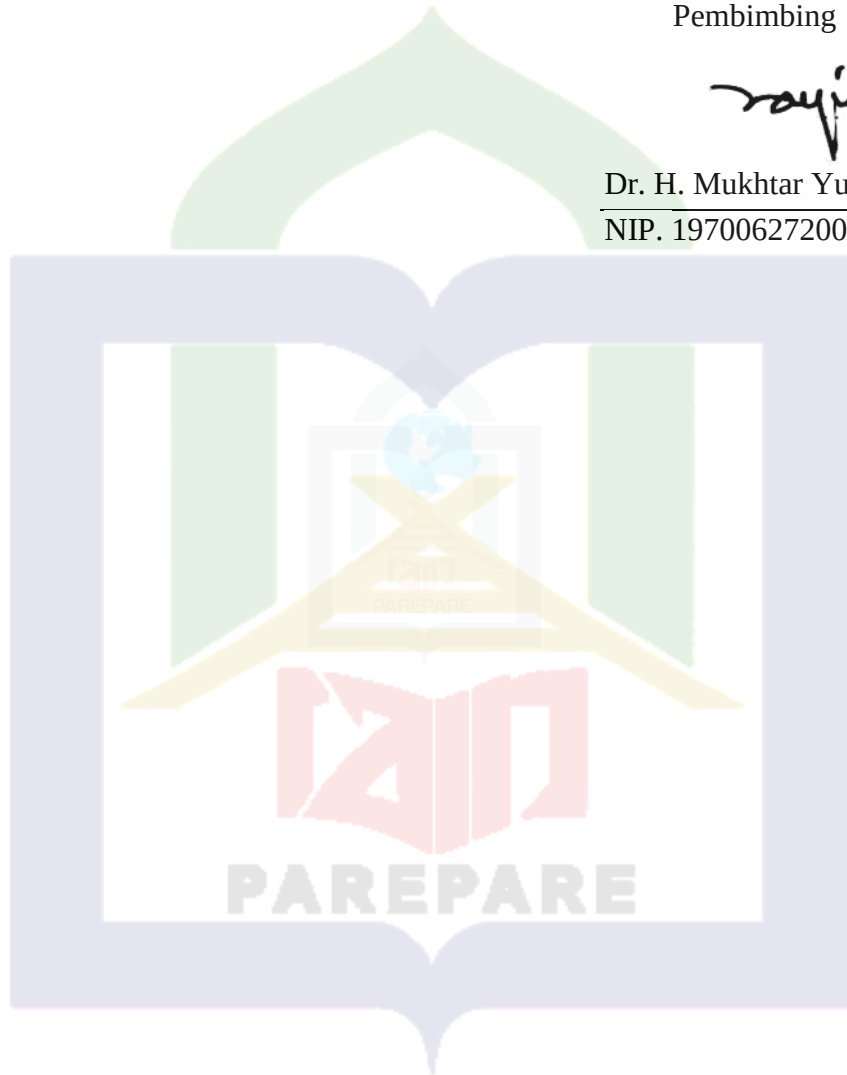
sudah sejalan dengan apa yang dibutuhkan warga di sini untuk memajukan ekonomi desa?

Parepare, 6 April 2026

Mengetahui-
Pembimbing



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M.Th.I
NIP. 197006272005011005



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SULEMAN
 UMUR : 33
 JENIS KELAMIN : Laki
 ALAMAT : LAPPALAPPAL, KEC SUPPA
 PEKERJAAN : MBR

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURKHAFIFAH ANUGRAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,


 (.....SULEMAN.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HJ. Mamusi
 UMUR : 56
 JENIS KELAMIN : Perempuan
 ALAMAT : Bilajeng
 PEKERJAAN : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURKHAFIFAH ANUGRAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,

(.....)
 HJ. Mamusi



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NUR AISYAH - J
 UMUR : 25 tahun
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 ALAMAT : BAMBAN KEC. BATULAPPA KAB. PINRANG
 PEKERJAAN : WIRASWASTA

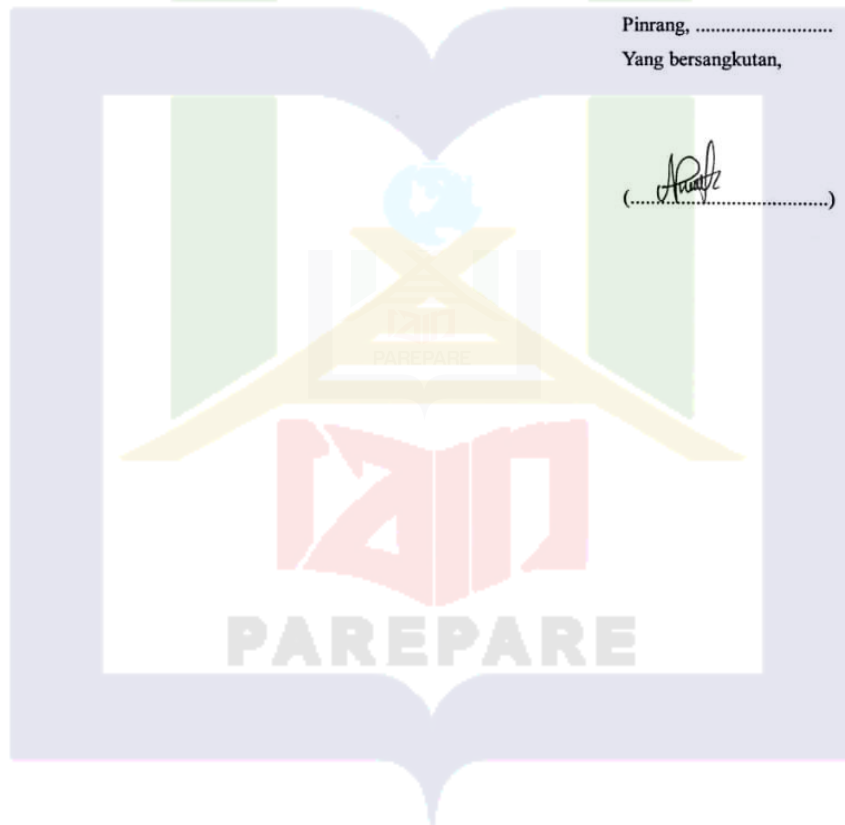
Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURKHAFIFAH ANUGRAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,

(..........)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Risna Arisanti
 UMUR : 36 Tahun
 JENIS KELAMIN : Perempuan
 ALAMAT : Bulis
 PEKERJAAN : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURKHAFIFAH ANUGRAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,


 (.....Risna Arisanti.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MAHMUD HAMZALI
 UMUR : 45
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 ALAMAT : BILAJENO FEL. KASSA. KEC. BATULAPPA
 PEKERJAAN : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURKHAFIFAH ANUGRAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,


 (.....)



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1196/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 April 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURKHAFIFAH ANUGRAH
Tempat/Tgl. Lahir	: AMMANI, 02 Juli 2004
NIM	: 2220203862201016
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KELURAHAN KASSA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMKM PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor 503/0221/PENELITIAN/DPMP/TSP/05/2026 Tentang SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
Menimbang	bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30-04-2026 atas nama NURKHAFIFAH ANUGRAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
Mengingat	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
Memperhatikan	1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0237/UT Teknis/DPMP/TSP/05/2026, Tanggal : 04-05-2026 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0223/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/05/2026, Tanggal : 04-05-2026
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
KESATU	1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 3. Nama Peneliti : NURKHAFIFAH ANUGRAH 4. Judul Penelitian : ANALISIS PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PEMERDAYAAN EKONOMI UMKM PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan 6. Sasaran/target Penelitian : PIHAK UMKM BATULAPPA - PIHAK BSI PINRANG 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa
KEDUA	Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-11-2026.
KETIGA	Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Mei 2026	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: left;"> Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANTI, AP.,M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang </div>	
Biaya : Rp 0,-	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div>	

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DARI BSI KC PINRANG

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Pinrang
Jl. Sultan Hasanuddin No. 34
Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
Indonesia
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muliani Mahmud
Jabatan : Branch Operation & Service Manager
NIP : 2186009770

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurkhafifah Anugrah
Nim : 2220203862201016
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal "Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr.wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk
KCP PINRANG



Muliana Mahmud

Branch Operation & Service Manager

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Makmur.
Hamzah Sebagai Salah Satu Nasabah
UMKM BSI KC Pinrang



Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah.
J Sebagai Salah Satu Nasabah
UMKM BSI KC Pinrang



Wawancara dengan Ibu Hj. Marnusi
Sebagai Salah Satu Nasabah UMKM BSI
KC Pinrang



Wawancara dengan Ibu Risna Aisanti
Sebagai Salah Satu Nasabah UMKM
BSI KC Pinrang



Wawancara dengan Bapak Suleman S Sebagai Pihak BSI Jabatan MBR

BIODATA PENULIS



Nama Penulis Nurkhafifah Anugrah, lahir pada tanggal 02 Juli 2004 di Ammani Kabupaten Pinrang yang merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Ayah bernama Sibali dan Ibu bernama Hafsah S. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2010-2016 di SDN 125 Bulisu, pada tahun 2016-2019 di SMPN 1 Batulappa, tahun 2019-2022 menempuh pendidikan di SMKN 6 Pinrang. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga di tahun 2026 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM Pada Masyarakat Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.